



PSKP
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

UPTD SDN 1 KIARAPEDES



Menavigasi Tantangan Pembelajaran Bahasa Inggris di Sekolah

Menuju Literasi Global

Menavigasi Tantangan Pembelajaran Bahasa Inggris di Sekolah

Menuju Literasi Global

Menavigasi Tantangan Pembelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Menuju Literasi Global

Pengarah

Anindito Aditomo (Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan)

Penanggung Jawab

Irsyad Zamjani (Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)

Tim Penyusun

Ikhya Ulumudin (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)

Relisa (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)

Untung Tri Rahmadi (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)

Sri Hidayati (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)

Dodi Setiyawan (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)

Asma Aisha (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)

Sisca Fujianita (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)

Kontributor

Yunita Murdiyningrum (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)

Hermanto Waruwu (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)

Lisnawati (J-PAL Southeast Asia)

Peter Abdullah (Segara Research Institute)

Mutiara Helga (Segara Research Institute)

Rizky Adhi Ramadhan (Segara Research Institute)

Rasita Purba (INOVASI)

Tri Maulana (INOVASI)

Stien Matakupan (Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan)

Itje Chodidjah (Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan)

Stephen Pratama (Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan)

Sotya Mayangwuri (Direktorat GTK Dikdas Kemendibudristek)

Waluyo (Direktorat SD Kemendibudristek)

Ety Sisdiana (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Nurlistiawati (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Penyunting

Lukman Solihin (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)

Diyana Nur Rakhmah (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan)

Foto Sampul

Ibar Warsita (Sekretariat BSKAP)

Tata Letak

Fardelia Nurhaliza

Cetakan Pertama, Mei 2024

xii + 80 hlm; 15,5 x 23 cm

Pengutipan/Sitasi:

Ulumudin, I., Relisa, Rahmadi, U. T., Hidayati, S., Setiyawan, D., Aisha, A., Fujanita, S., Murdiyningrum, Y., Waruwu, H., Lisnawati, Abdullah, P., Helga, M., Ramadhan, R. A., Purba, R., Maulana, T., Matakupan, S., Chodidjah, I., Pratama, S., Mayangwuri, S., Waluyo, Sisdiana, E., Nurlistiawati. (2024). *Menavigasi Tantangan Pembelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Menuju Literasi Global*. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP).

Diterbitkan oleh:

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kompleks Kemendikbudristek, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365 | Faks.+6221-5741664
Website: <https://pskp.kemdikbud.go.id>
Email: pskp.kemendikbudristek@gmail.com

© Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek 2024

Buku ini dapat diperbanyak dan diterjemahkan baik sebagian maupun keseluruhan, tetapi tidak untuk diperjualbelikan maupun digunakan untuk tujuan komersial.



KATA PENGANTAR

Dalam konteks hubungan internasional, bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa yang paling dominan dan tersebar luas di seluruh dunia, menjadikannya bahasa pengantar paling penting. Dalam era globalisasi, bahasa Inggris menjadi bahasa bisnis, ilmu pengetahuan, teknologi, dan diplomasi yang dominan. Penguasaan terhadap bahasa ini dapat mempersiapkan peserta didik untuk berperan aktif dalam dunia yang semakin terhubung. Meskipun demikian, Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang belum mewajibkan mata pelajaran bahasa Inggris dalam kurikulum di jenjang SD. Melihat kondisi dan perkembangan saat ini, diperlukan strategi untuk dapat mendukung penguasaan bahasa Inggris oleh penduduk Indonesia, khususnya untuk peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui optimalisasi penyelenggaraan mata pelajaran bahasa Inggris di satuan pendidikan sejak jenjang pendidikan dasar.

Pada 2022 dan 2023, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan bekerja sama dengan berbagai pihak telah melakukan kajian mengenai penerapan mata pelajaran bahasa Inggris di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hasil kajian ini dapat memberikan gambaran mengenai kesiapan satuan pendidikan untuk menerapkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib untuk tingkat sekolah dasar, strategi untuk meningkatkan kesiapan tersebut, dan upaya untuk mendukung ketersediaan guru bahasa Inggris di tingkat SD.

Kami berterima kasih kepada para penulis, analis data, dan berbagai pihak yang mendukung penyelesaian laporan ini. Kami berharap agar laporan kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

Jakarta, Maret 2024

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Anindito Aditomo



DAFTAR ISI

Kata Pangantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Bab 1 Pentingnya Bahasa Inggris dalam Membangun Sumber Daya Manusia yang Memiliki Daya Saing Global	1
Bab 2 Bahasa Inggris sebagai Salah Satu Mata Pelajaran untuk Sekolah Dasar di Indonesia dari Masa ke Masa	5
Bab 3 Praktik Baik Penyelenggaraan Bahasa Inggris sebagai Mata Pelajaran Wajib di Negara-Negara Asia	9
A. Korea Selatan	10
B. Filipina	14
C. Bangladesh	15
Bab 4 Metodologi Kajian dan Profil Responden	17
A. Metodologi Kajian	17
B. Profil Satuan Pendidikan	18
C. Profil Guru dan Tenaga Kependidikan	19
Bab 5 Kesiapan Satuan Pendidikan untuk Menerapkan Bahasa Inggris sebagai Mata Pelajaran Wajib di Sekolah Dasar	21
A. Kondisi Eksisting Penerapan Bahasa Inggris sebagai Mata Pelajaran Wajib di Sekolah Dasar	21
B. Persepsi terhadap Penerapan Bahasa Inggris sebagai Mata Pelajaran Wajib di Tingkat Sekolah Dasar	23

C. Dukungan Kebijakan dan Kerangka Regulasi	25
D. Kesiapan Guru Sekolah Dasar untuk menerapkan Bahasa Inggris sebagai Mata Pelajaran Wajib	31
E. Kesiapan Peserta Didik	35
F. Dukungan Materi dan Metode Pembelajaran	39
Bab 6 Strategi Meningkatkan Kesiapan Penerapan Bahasa Inggris sebagai Mata Pelajaran Wajib di Tingkat Sekolah Dasar	41
A. Kapan Sebaiknya Bahasa Inggris Diterapkan di Sekolah Dasar	41
B. Bagaimana Sebaiknya Penerapan Bahasa Inggris di Tingkat Sekolah Dasar Dilakukan	44
C. Penyiapan Materi Pembelajaran dan Perangkat Ajar	46
D. Penyiapan Guru untuk Mengajar Bahasa Inggris	54
Bab 7 Peningkatan Kompetensi Guru SMP dan SMA/SMK untuk Mendukung Ketersediaan Guru Bahasa Inggris di Tingkat SD	63
Bab 8 Rekomendasi untuk Para Pemangku Kepentingan	69
A. Rekomendasi Kebijakan untuk Penerapan Bahasa Inggris sebagai Mata Pelajaran Wajib di Tingkat SD	69
B. Rekomendasi Kebijakan untuk Penerapan Bahasa Inggris sebagai Mata Pelajaran Wajib di Tingkat SMP	71
C. Rekomendasi Kebijakan untuk Penerapan Bahasa Inggris sebagai Mata Pelajaran Wajib di Tingkat SMA/SMK	73
Daftar Pustaka.....	77



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perubahan Alokasi Jam Pelajaran Bahasa Inggris dalam Kurikulum di Indonesia	5
Tabel 2	Ringkasan mengenai Penerapan Bahasa Inggris sebagai Mata Pelajaran Wajib di Tingkat Sekolah Dasar di Negara-negara ASEAN dan Asia Timur	9
Tabel 3	Struktur Kurikulum di Sekolah Dasar Korea Selatan	12
Tabel 4	Sebaran Sampel Satuan Pendidikan berdasarkan Jenjang di setiap Kabupaten/Kota	19
Tabel 5	Persyaratan Keterampilan Bahasa Inggris di Asia Tenggara	55
Tabel 6	Kompetensi Minimal yang Harus dikuasai Guru Menurut Kepala Sekolah	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Hasil UN Mapel Bahasa Inggris di SMP dan SMA Tahun 2015-2019	4
Gambar 2	Rencana Mewajibkan Mata Pelajaran Bahasa Inggris di Tingkat SD	8
Gambar 3	Ringkasan Desain Kajian	18
Gambar 4	Alasan Utama Penerapan Mata Pelajaran Bahasa Inggris di Satuan Pendidikan	22
Gambar 5	Alasan Utama Satuan Pendidikan Belum Menyelenggarakan Mata Pelajaran Bahasa Inggris	23
Gambar 6	Persepsi Kepala Sekolah dan Guru terkait Penerapan Bahasa Inggris sebagai Mata Pelajaran Wajib di SD	24
Gambar 7	Kebijakan yang Belum Mendukung Penyelenggaraan Pembelajaran Bahasa Inggris menurut Persepsi Kepala Sekolah	29
Gambar 8	Kebijakan yang Dapat Mendukung Implementasi Pembelajaran Bahasa Inggris Menurut Persepsi Guru	30
Gambar 9	Dukungan Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan Kapasitas Kemampuan Bahasa Inggris Guru yang Dinilai Masih Kurang	31
Gambar 10	Persepsi Responden Guru SD terhadap Kemampuan Mengajarkan Materi Mata Pelajaran Bahasa Inggris di Tingkat SD	32
Gambar 11	Nilai Tes Kemampuan Bahasa Inggris Guru SD	33
Gambar 12	Nilai Tes Kemampuan Bahasa Inggris Guru SD berdasarkan Wilayah	34

Gambar 13	Persepsi Guru Sekolah Dasar terhadap Kefasihan Berbahasa Indonesia Peserta Didik	36
Gambar 14	Persepsi Guru terhadap Latar Belakang Ekonomi Keluarga Peserta Didik di Sekolah Dasar yang Mereka Ajar	38
Gambar 15	Kompetensi Peserta Didik dalam Berbahasa Inggris Ketika Awal Sekolah dan Lulus Sekolah	39
Gambar 16	Tingkatan Kelas yang Seharusnya Mulai Ditetapkan Bahasa Inggris Menurut Guru SD (kiri) dan Kepala Sekolah SD (kanan)	42
Gambar 17	Jumlah Rombongan Belajar Ideal yang Harus diajar oleh Seorang Guru Bahasa Inggris Menurut Responden Kepala Sekolah	43
Gambar 18	Kapan Sebaiknya Penerapan Bahasa Inggris di SD Dapat Diterapkan Menurut Responden Kepala Sekolah SD	43
Gambar 19	Jumlah JP Bahasa Inggris di SD Menurut Responden Guru dan Kepala Sekolah	44
Gambar 20	Bentuk Strategi untuk Menambah JP Bahasa Inggris	45
Gambar 21	Preferensi Jumlah Waktu Pelatihan Guru Bahasa Inggris dan Persyaratan bagi Guru Bahasa Inggris sebelum Mengajar	59
Gambar 22	Kualifikasi Guru yang Mengajarkan Bahasa Inggris di SD Menurut Guru SD	61
Gambar 23	Jumlah Jam Pelajaran Bahasa Inggris SMP/SMA/SMK per Minggu	64
Gambar 24	Persepsi Kepala Sekolah terhadap Kemampuan Pedagogik Guru di Satuan Pendidikannya	65
Gambar 25	Nilai Tes Kemampuan Bahasa Inggris Guru Bahasa Inggris SMP, SMA, dan SMK	66
Gambar 26	Persepsi Penguasaan Materi Pelajaran Bahasa Inggris menurut Responden Guru	67
Gambar 27	Rata-Rata Nilai CEFR Berdasarkan Kabupaten/Kota, Sekolah Negeri/Swasta, dan Kualifikasi Pendidikan	68

BAB 1

PENTINGNYA BAHASA INGGRIS DALAM MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG MEMILIKI DAYA SAING GLOBAL

Ki Hadjar Dewantara (dalam Umam dkk, 2020) mengatakan bahwa pendidikan memiliki tujuan mendasar, yaitu melahirkan individu yang memiliki kemerdekaan dalam segi fisik, mental, dan rohani. Maksud utama pendidikan adalah untuk menciptakan manusia yang beradab, sebab melalui perilaku yang baik inilah seseorang menjadi pribadi yang bebas dan mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ki Hadjar juga mengatakan bahwa anak-anak harus dididik dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri (Dewantara, 2009). Hal ini menyiratkan bahwa pendidikan perlu beradaptasi dengan persyaratan dan perubahan zaman untuk menciptakan kemajuan, baik dalam cara berpikir maupun dalam aspek kreativitas.

Pengajaran bahasa memiliki tujuan kultural yang bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia (Dewantara, 1977). Pengajaran bahasa memberikan fondasi bagi kita sebagai bagian dari masyarakat, sementara pengajaran bahasa asing memberikan kesempatan untuk memperkaya budaya bangsa dengan “nilai kebatinan” dari berbagai bangsa lain. Setiap negara dan bangsa memiliki kekayaan ilmu dan pengetahuan yang unik dari Tuhan YME. Bahasa asing menjadi sarana untuk memperkaya kebudayaan kita. Ki Hadjar Dewantara berpendapat bahwa pemilihan bahasa asing yang tepat untuk dipelajari harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai ilmu yang ingin dikuasai dan asal-usulnya.

Dalam konteks hubungan internasional, bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa yang paling dominan dan tersebar luas di seluruh dunia, menjadikannya bahasa paling penting di dunia. Bahasa Inggris juga merupakan bahasa utama yang digunakan dalam komunikasi global. Menurut laporan *Ethnologue: Languages of the World*, setidaknya ada sekitar 1,3 miliar orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi, baik

sebagai bahasa ibu maupun sebagai bahasa kedua (Mudogo, 2020). Bahasa Inggris juga ditetapkan menjadi bahasa resmi dan digunakan sebagai bahasa internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Apabila mayoritas penduduk negara tersebut sudah menguasai bahasa Inggris, maka negara tersebut dapat digolongkan sebagai negara maju. Dengan menguasai bahasa Inggris, maka penduduk negara tersebut dapat berkomunikasi dan bersaing dalam segala bidang dengan negara lain di seluruh dunia.

Dalam era globalisasi, perekonomian dan perkembangan teknologi semakin terintegrasi. Bahasa Inggris menjadi bahasa bisnis, ilmu pengetahuan, teknologi, dan diplomasi yang dominan. Penguasaan terhadap bahasa ini dapat mempersiapkan peserta didik untuk berperan aktif dalam dunia yang semakin terhubung. Kemampuan berbicara dan menguasai bahasa Inggris bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan menjadi kebutuhan utama bagi setiap individu di era globalisasi saat ini. Hal ini dikarenakan dominasi bahasa Inggris dalam hampir semua aspek kehidupan (Nuraeni, 2021; Mika dkk, 2023). Sebagian besar literatur ilmiah, buku teks, jurnal akademik, dan sumber daya belajar terbaik tersedia dalam bahasa Inggris. Banyak perkembangan teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), berasal dari negara-negara berbahasa Inggris. Penguasaan bahasa ini memungkinkan peserta didik untuk memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber-sumber informasi tersebut serta dapat mengikuti perkembangan teknologi dan berkontribusi dalam inovasi global.

Banyak program studi di universitas top dunia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Peserta didik dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik memiliki peluang lebih besar untuk mengejar pendidikan tinggi di lembaga-lembaga bergengsi. Dalam hal kesempatan kerja, banyak perusahaan internasional memprioritaskan calon yang mampu berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris. Lingkungan kerja yang kompetitif, mensyaratkan keterampilan berbahasa Inggris sebagai nilai tambah bagi para calon pekerjanya. Selain itu, penting bagi sebuah negara memiliki warga negara dengan kompetensi bahasa asing untuk dapat meningkatkan daya saing global serta pembangunan nasional yang berkelanjutan (Hamid & Kirkpatrick dalam Sulistiyo, 2020).

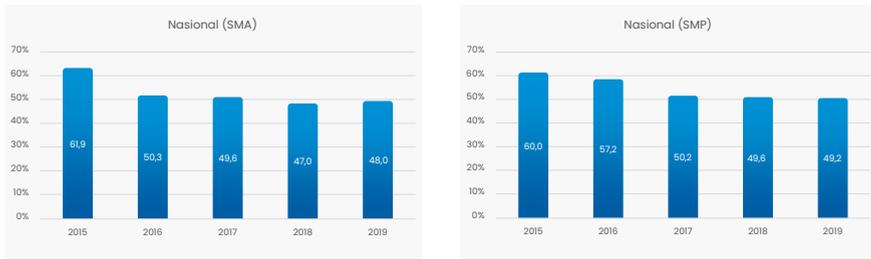
Perbedaan kemampuan berbahasa Inggris juga dapat berperan dalam

menyebabkan kesenjangan kualitas pembelajaran antarpeserta didik dan antarunit pendidikan. Selama masa pembelajaran dari rumah saat pandemi COVID-19, sumber belajar daring menjadi sangat penting bagi pendidik dan peserta didik. Sayangnya, mayoritas sumber belajar tersebut menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya. Akibatnya, jika guru dan peserta didik tidak mahir dalam bahasa Inggris, mereka tidak dapat mengakses sumber-sumber belajar berkualitas yang dapat membantu mengatasi ketertinggalan dalam pembelajaran. Sebaliknya, untuk unit pendidikan yang telah mengadopsi pembelajaran bahasa Inggris, mereka dapat dengan lebih mudah mengakses sumber-sumber belajar tersebut.

Meskipun demikian, Indonesia merupakan negara yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama dan belum menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Dalam pendidikan, Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang belum mewajibkan mata pelajaran bahasa Inggris dalam kurikulum di jenjang SD. Kondisi ini juga tercermin dari nilai bahasa Inggris peserta didik dari SMP, SMA hingga perguruan tinggi yang berada di bawah rata-rata dibandingkan dengan negara lainnya, mengindikasikan adanya ketertinggalan akademik khususnya dalam berbahasa asing.

Urgensi untuk mempelajari bahasa Inggris sudah disadari para orang tua dan hal ini tercermin dari tren penerapan bahasa Inggris di sekolah-sekolah di Indonesia. Meskipun pada jenjang SD bahasa Inggris bukan merupakan mata pelajaran wajib, tetapi banyak sekolah yang tetap menjadikan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib karena adanya *demand* dari orang tua peserta didik. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya memiliki keterampilan bahasa Inggris sejak usia dini (Sulistiyo, 2020).

Sayangnya, jika melihat hasil Ujian Nasional pada tingkat SMP dan SMA pada tahun 2015-2019, yakni sebelum diterapkannya Asesmen Nasional, nilai ujian bahasa Inggris cenderung mengalami tren penurunan. Dalam periode lima tahun tersebut, nilai ujian bahasa Inggris tingkat SMP secara rata-rata turun sebesar 4,8% sementara di tingkat SMA terjadi penurunan sebesar 5,8%. Oleh karena itu, diperlukan langkah lebih lanjut untuk dapat mendukung penguasaan bahasa Inggris oleh penduduk Indonesia dari usia muda, khususnya untuk peserta didik di jenjang sekolah dasar dan menengah.



Gambar 1 Hasil UN Mapel Bahasa Inggris di SMP dan SMA Tahun 2015-2019

Dalam pembelajaran bahasa Inggris, terutama di sekolah, banyak aspek penting yang perlu disiapkan secara matang untuk mendukung pembelajaran yang efektif terutama dengan mempertimbangkan bahwa bahasa Inggris bukan sebagai bahasa ibu. Aspek-aspek tersebut mencakup kurikulum pembelajaran, materi dan metode pengajaran, serta kualitas guru. Menurut Hinkel (2011), ketika seseorang belajar bahasa, mereka membutuhkan input yang menarik, relevan, dan mudah dimengerti untuk dapat mengembangkan kemampuan bahasa mereka. Mengutip Swain (1985) dan Lindholm-Leary (2007) dalam Hinkel (2011), mempelajari bahasa kedua dalam pembelajaran di sekolah perlu didukung dengan berbagai kegiatan tertulis dan oral dengan mengombinasikan kegiatan yang berpusat pada peserta didik dan kegiatan yang berfokus pada instruksi dari guru. Guru juga memegang peranan yang sangat penting agar mampu menerapkan pembelajaran berdasarkan perspektif peserta didik dan menciptakan lingkungan belajar untuk peserta didik dapat berkembang (Archana, 2017). Menurut Archana, evaluasi perlu dilakukan oleh guru terutama apabila hasil evaluasi tersebut digunakan untuk memperbaiki pembelajaran terutama dengan berfokus pada kekuatan anak, bukan kelemahan, ketika mendidik anak untuk belajar bahasa Inggris.

BAB 2

BAHASA INGGRIS SEBAGAI SALAH SATU MATA PELAJARAN UNTUK SEKOLAH DASAR DI INDONESIA DARI MASA KE MASA

Sejak merdeka hingga saat ini, telah terjadi beberapa kali perubahan kurikulum yang juga berdampak pada mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah, baik posisinya sebagai mata pelajaran wajib, muatan lokal, atau peminatan dan juga jumlah jam pelajaran (JP) yang dialokasikan untuk mata pelajaran tersebut. Pada jenjang sekolah dasar, dinamika penerapan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran sangat terlihat. Mata pelajaran bahasa Inggris mulai diajarkan di sekolah dasar (SD) sejak kurikulum nasional 1994 sebagai muatan lokal, dan terus berlanjut di kurikulum 2004 (KBK) dan kurikulum 2006 (KTSP) dengan alokasi 2 jam pelajaran (JP) per minggu. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh daerah ketika bahasa Inggris berstatus muatan lokal, yaitu kementerian tidak mengeluarkan kurikulum bahasa Inggris untuk SD, sehingga pemerintah daerah maupun satuan pendidikan harus mengembangkan kurikulum muatan lokal masing-masing (Hawanti, 2014). Pada Kurikulum 2013, mata pelajaran bahasa Inggris tidak masuk ke dalam struktur kurikulum. Dan saat ini, di Kurikulum Merdeka bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan bagi sekolah dasar dengan alokasi waktu 2 JP/minggu.

Tabel 1 Perubahan Alokasi Jam Pelajaran Bahasa Inggris dalam Kurikulum di Indonesia

Kurikulum	Alokasi Jam Pelajaran Per Minggu		
	SD	SMP	SMA
Kurikulum 1968	-	3 JP/Minggu	3-4 JP/Minggu
Kurikulum 1975	-	4 JP/Minggu	3-7 JP/Minggu
Kurikulum 1984	-	4 JP/Minggu	3-7 JP/Minggu
Kurikulum 1994	2 JP/Minggu (Muatan Lokal)	4 JP/Minggu	4-6 JP/Minggu

Kurikulum	Alokasi Jam Pelajaran Per Minggu		
	SD	SMP	SMA
Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi)	2 JP/Minggu (Muatan Lokal)	4 JP/Minggu	4-6 JP/Minggu
Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)	2 JP/Minggu (Muatan Lokal)	4 JP/Minggu	4-5 JP/Minggu
Kurikulum 2013		4 JP/Minggu	2 JP/Minggu
Kurikulum Merdeka	2 JP/Minggu (Mapel Pilihan)	3-4 JP/Minggu	2 JP/Minggu

Sumber: Olah data Alfariy (2021), Kemendikbudristek (2022)

Pada jenjang sekolah menengah pertama terdapat konsistensi tentang posisi bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib dan juga alokasi JP per minggunya, yaitu 3–4 JP. Hal ini berbeda dengan alokasi JP mata pelajaran bahasa Inggris pada jenjang sekolah menengah atas yang mengalami beberapa kali perubahan sepanjang pergantian kurikulum nasional sejak 1968 hingga Kurikulum Merdeka. Alokasi mata pelajaran bahasa Inggris yang sebelumnya 3–4 JP/minggu pada kurikulum 1968 meningkat sampai 3–7 JP/minggu menyesuaikan konsentrasi atau jurusan yang dipilih oleh peserta didik pada kurikulum 1975, lalu berubah menjadi 4–6 JP/minggu tergantung pada jurusan peserta didik tersebut pada kurikulum 1994, kurikulum 2004, dan kurikulum 2006. Namun, terjadi penurunan drastis pada kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, yaitu hanya menjadi 2 JP/minggu. Kondisi-kondisi tersebut mengindikasikan lemahnya posisi mata pelajaran bahasa Inggris dalam kurikulum di Indonesia. Penghapusan mata pelajaran bahasa Inggris, pengurangan jam pelajaran, maupun perubahan status lain yang mendegradasi posisinya dalam kurikulum secara tidak langsung dapat memperbesar gap akses peserta didik terhadap bahasa Inggris.

Pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia secara resmi dimulai pada tahun 1967 dengan munculnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 096 Tahun 1967 tentang Fungsi dan Tujuan Pengajaran Bahasa Inggris pada Lembaga-Lembaga Pendidikan Tingkat Lanjutan dalam Lingkungan Departemen P dan K. Mr. Wachendorf sebagai Kepala Inspektorat Pusat Pengajaran Bahasa Inggris saat itu ingin peserta didik mempunyai keterampilan bahasa Inggris pada domain membaca,

mendengar, menulis, dan berbicara (Alfarisy, 2021). Kedudukan bahasa Inggris juga dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, bahasa Inggris disematkan sebagai bahasa asing pertama dan diamanatkan untuk diajarkan sebagai mata pelajaran wajib pada tingkat SMP dan SMA. Beberapa tahun setelah itu, dengan terbitnya SK No. 060/U/1993; SK No. 170/105/1994 bahasa Inggris menjadi muatan lokal di sekolah dasar kelas 4, 5, sampai kelas 6.

Pada perkembangan berikutnya, Kemendikbud melalui Pusat Kurikulum menegaskan bahwa berdasarkan komitmen pemerintah untuk mengembangkan seluruh aspek profil pelajar Pancasila, termasuk aspek keberagaman global, pendidikan bahasa Inggris menjadi salah satu fokus utama dalam Kurikulum Merdeka (Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2022). Penyesuaian kurikulum bahasa Inggris dengan kurikulum nasional menjadi pertimbangan penting yang mendorong anjuran kepada satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan mata pelajaran ini.

Hasil evaluasi Kurikulum 2013 yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan menemukan permasalahan dalam kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik jenjang SMP. Tanpa adanya pendidikan bahasa Inggris di jenjang SD, para peserta didik jenjang SMP diharapkan memiliki kemampuan setara dengan tingkat menengah (*intermediate level*). Artinya, mereka diharapkan mencapai tingkat kemampuan yang cukup kompleks tanpa ada pembelajaran pada tingkat dasar (*basic level*).

Oleh karena itu, untuk dapat mengatasi kesenjangan pencapaian kompetensi ini diperlukan sebuah *roadmap* yang jelas untuk mendukung rencana mewajibkan mata pelajaran bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar. Sebagai awal untuk mendukung rencana tersebut, sebuah kajian untuk mendalami situasi saat ini terkait kesiapan guru, tenaga kependidikan, serta modul dan materi pembelajaran merupakan hal yang esensial. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait strategi untuk meningkatkan kesiapan berdasarkan tingkat kesiapan tersebut dan upaya peningkatan kompetensi guru SMP dan SMA/SMK untuk mendukung ketersediaan guru bahasa Inggris di tingkat SD.



Gambar 2 Rencana Mewajibkan Mata Pelajaran Bahasa Inggris di Tingkat SD

BAB 3

PRAKTIK BAIK PENYELENGGARAAN BAHASA INGGRIS SEBAGAI MATA PELAJARAN WAJIB DI NEGARA- NEGARA ASIA

Seperi telah disampaikan pada bagian sebelumnya mengenai perkembangan bahasa Inggris dalam berbagai kurikulum yang diterapkan di Indonesia mulai Kurikulum 1968 sampai dengan Kurikulum Merdeka, penerapan mata pelajaran bahasa Inggris di tingkat SD hanya sebagai bagian dari muatan lokal. Berbeda dengan negara-negara lain di ASEAN beserta tiga negara di Asia Timur yang sudah menerapkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib, seperti di Malaysia, Filipina, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Laos, Thailand, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Total jumlah jam pelajaran bahasa Inggris di negara-negara tersebut berkisar antara 40 menit sampai 300 menit per minggu. Beberapa negara mulai mengajarkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib sejak kelas 1 SD, tetapi terdapat juga yang mulai mengimplementasikannya di kelas 3 dan 5.

Tabel 2 Ringkasan mengenai Penerapan Bahasa Inggris sebagai Mata Pelajaran Wajib di Tingkat Sekolah Dasar di Negara-negara ASEAN dan Asia Timur

Negara	Status B. Inggris dalam Kurikulum	Kelas Mulai Diterapkannya B. Inggris	Durasi Jam Pelajaran Per Minggu
Malaysia	Wajib	Kelas 1	300 menit di sekolah negeri
Brunei Darussalam	Bahasa Pengantar	Kelas 1	Digunakan dalam mata pelajaran matematika dan sains
Singapura	Bahasa Pengantar	Kelas 1	Digunakan di semua mata pelajaran
Indonesia	Pilihan/muatan lokal	Kelas 1	2 x 45 menit
Filipina	Wajib	Kelas 1	Digunakan di semua mata pelajaran
Myanmar	Wajib	Kelas 1	1 x 40 menit
Kamboja	Wajib	Kelas 4	2 - 4 jam

Negara	Status B. Inggris dalam Kurikulum	Kelas Mulai Diterapkannya B. Inggris	Durasi Jam Pelajaran Per Minggu
Vietnam	Wajib	Kelas 3	4 x 45 menit
Laos	Wajib	Kelas 3	2 x 45 menit
Thailand	Wajib	Kelas 1	Kelas 1 - 3 : 1 jam kelas 4 - 6 : 2 jam
Tiongkok	Wajib	Kelas 3	3 x 40 menit
Jepang	Wajib	Kelas 5	45 menit
Korea Selatan	Wajib	Kelas 3	Kelas 3 - 4 : 2 x 40 menit Kelas 5 - 6 : 3-4 x 40 menit

Catatan: Data hanya memuat penerapan di sekolah negeri
Sumber: Zein (2017)

Lebih jauh, di Brunei Darussalam dan Singapura, bahasa Inggris sudah menjadi bahasa pengantar di SD mulai dari kelas 1. Di Brunei Darussalam, bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar untuk mata pelajaran matematika dan sains, sementara di Singapura seluruh mata pelajaran menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Dari negara-negara yang sudah menerapkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib terdapat pengalaman-pengalaman yang dapat menjadi pembelajaran dan rujukan bagi penerapan mata pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di Indonesia. Subbab selanjutnya menyediakan ringkasan mengenai praktik baik penyelenggaraan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di Korea Selatan, Filipina, dan Bangladesh.

A. Korea Selatan

Korea Selatan merupakan salah satu negara maju yang terletak di Asia Timur yang berbatasan langsung dengan Korea Utara dan berada cukup dekat dengan negara-negara maju di Asia lainnya, seperti Jepang dan Tiongkok. Negara yang terkenal dengan industri hiburannya seperti K-POP atau K-Drama ini ternyata termasuk negara yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik meskipun memiliki bahasa aslinya sendiri, yaitu bahasa Korea. Berdasarkan peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga English First (EF), kemampuan berbahasa Inggris orang Korea berada pada peringkat ke-36 dari 111 negara.

Keberhasilan pemerintah Korea Selatan sehingga masyarakatnya dapat memiliki kemampuan berbahasa Inggris tidak terlepas dari perbaikan kurikulum pendidikan nasional secara terus-menerus. Pada perbaikan kurikulum pendidikan nasional yang ketujuh pada tahun 1997, salah satu perubahan signifikan yang terjadi adalah dimasukkannya bahasa Inggris sebagai salah satu mata pelajaran wajib di Korea Selatan yang diajarkan mulai dari kelas 3 (tiga) sekolah dasar. Sebelumnya, bahasa Inggris hanya diimplementasikan sebagai ekstrakurikuler saja.

Kurikulum bahasa Inggris di Korea Selatan berfokus pada kompetensi komunikatif dan menerapkan pendekatan komunikatif yang bertujuan agar peserta didik menguasai kecakapan bahasa Inggris sehari-hari. Untuk mencapai tujuan tersebut, struktur pada kurikulum yang dibebankan kepada peserta didik di setiap jenjangnya disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan lebih menekankan kepada pengembangan karakter moral peserta didik, kebiasaan dasar, dan kemampuan yang diperlukan untuk belajar dan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, pada jenjang ini pendidikan bahasa Inggris tidak diajarkan kepada kelas 1 dan 2 agar peserta didik mengembangkan “bahasa pertama” mereka sebelum mempelajari “bahasa kedua”. Sementara untuk kelas 3 dan 4 sekolah dasar diberikan tidak terlalu banyak beban mata pelajaran bahasa Inggris, yakni 136 jam mata pelajaran per tahun atau 2 jam per minggu dan 204 jam mata pelajaran per tahun atau 3 jam per minggu bagi peserta didik kelas 5 dan 6. Selanjutnya pada jenjang pendidikan menengah, pendidikan ditekankan kepada pengembangan kemampuan dasar peserta didik yang diperlukan untuk belajar dan kehidupan sehari-hari, serta membina karakter moral dan kualitas warga negara yang demokratis. Beban yang diberikan terhadap pembelajaran bahasa Inggris pun bertambah, yaitu 340 jam mata pelajaran per tahun.

Tabel 3 Struktur Kurikulum di Sekolah Dasar Korea Selatan

Categories		Grade 1-2	Grade 3-4	Grade 5-6
Subject (Subject Cluster)	<i>Korean Language</i>	<i>Korean Language</i> 448	408	408
	<i>Social Studies/ Moral Education</i>	<i>Mathematics</i> 256	272	272
	<i>Mathematics</i>	<i>Moral Life</i> 128	204	340
	<i>Science/ Practical Arts</i>	<i>Inquiring Life</i> 192	204	340
	<i>Physical Education</i>	<i>Pleasant Life</i> 384	204	204
	<i>Arts (Music/Art)</i>		272	272
	<i>English</i>		136	204
	<i>Subtotal</i>	1.408	1.768	1.972
<i>Creative Experiential</i>	336	204	204	
<i>Activities</i>	<i>Safe Life (64)</i>			
Total Instructional Hours	1.744	1.972	2.176	

Sumber: Kementerian Pendidikan Korea (2015)

Keberhasilan program pemerintah Korea Selatan terhadap pendidikan bahasa Inggris juga disertai dengan beberapa kebijakan inovasi untuk mendorong perkembangannya. Beberapa kebijakan tersebut, yakni sistem perekrutan guru, kebijakan guru penutur asli, dan kebijakan tes kemampuan skolastik perguruan tinggi atau *College Scholastic Ability Test (CSAT)*.

1. Sistem Perekrutan Guru

Pendidikan guru dan sistem perekrutan guru yang ketat di Korea Selatan merupakan faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kemampuan kompetitif Korea Selatan di dunia. Untuk menjadi guru di Korea Selatan hanya dapat dilalui melalui dua jalur. Jalur pertama, mengikuti program perkuliahan selama 4 tahun di *Kyoyuk Daehak* untuk dapat menjadi guru sekolah dasar atau di *Sabeomdaehak* untuk dapat menjadi guru di jenjang pendidikan menengah. Jalur kedua, apabila sudah mengambil jurusan tertentu di perguruan tinggi, maka orang tersebut harus mengambil tambahan pendidikan pedagogi atau mengambil gelar master (S2) pada jurusan yang terkait dengan pendidikan.

Adanya pemisahan metode pendidikan bagi calon guru pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah memperlihatkan bagaimana pemerintah Korea Selatan berupaya memfokuskan pendidikan guru sesuai dengan jenjang pendidikan yang harus diampu. Selain itu, apabila bukan berlatar belakang pendidikan, untuk dapat menjadi guru dibutuhkan tahapan tambahan pendidikan untuk memperoleh kemampuan pedagogik, baik dalam jalur pendidikan setara S1 ataupun tingkat pendidikan di atasnya.

2. Kebijakan Guru Penutur Asli

Salah satu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam pendidikan bahasa Inggris adalah dengan mengundang penutur asli bahasa Inggris untuk datang dan mengajar di sekolah negeri melalui program yang disebut *English Program in Korea* (EPIK). Kebijakan ini memberikan dampak penting bagi pendidikan bahasa Inggris di Korea Selatan. Tidak hanya di dalam pembelajaran kelas, tetapi juga mengubah paradigma peserta didik dan guru di Korea Selatan bahwa mereka memerlukan bahasa Inggris sebagai kemampuan komunikasi penting dalam kehidupan nyata dan tidak hanya digunakan di dalam kelas saja.

3. Kebijakan *College Scholastic Ability Test* (CSAT)

CSAT atau *Suneung* merupakan ujian yang harus diambil oleh semua peserta didik yang ingin masuk ke dalam universitas di Korea Selatan. Bahasa Inggris merupakan salah satu mata ujian yang diujikan di dalam CSAT. Pada kebijakan terdahulu, tes bahasa Inggris lebih terfokus kepada fonologis, leksikal, maupun *grammar* pada bahasa Inggris. Di dalam CSAT, kebijakan tes pada bahasa Inggris mengalami perubahan dengan lebih terfokus kepada kemampuan komunikatif bahasa Inggris peserta didik seperti *listening* dan *reading*.

Adanya perubahan di dalam materi yang diujikan pada mata ujian bahasa Inggris di CSAT memberikan dampak yang signifikan. Sebelum adanya kebijakan pada CSAT, peserta didik lebih terfokus kepada menganalisis struktur *grammar* dan tidak familiar dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Setelah diperkenalkannya *listening* dan *reading* pada CSAT, peserta didik mulai menggunakan berbagai multimedia seperti kaset audio dalam pembelajarannya.

B. Filipina

Filipina merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan Indonesia. Negara bekas jajahan Spanyol ini merupakan negara yang kaya dengan keanekaragaman bahasa dengan memiliki lebih dari 100 bahasa. Meskipun memiliki keanekaragaman bahasa, ternyata masyarakat Filipina memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Menurut peringkat yang dikeluarkan oleh EF, kemampuan berbahasa Inggris masyarakat Filipina termasuk ke dalam kategori *High Proficiency* dan berada di peringkat ke-22 dari 111 negara.

Penguasaan bahasa Inggris yang baik di Filipina tidak terlepas dari adanya reformasi kurikulum bahasa Inggris pada pendidikan atau yang disebut juga dengan *K to 12 English Curriculum (K-12 Language Arts and Multiliteracies Curriculum)*. Kebijakan ini lahir sebagai respons atas menurunnya hasil ujian nasional Filipina (NAT) dan ketidakcocokan keterampilan (*skill mismatch*) terhadap dunia industri. Dalam hal ini, pemerintah Filipina memandang bahwa kemampuan berbahasa, berpikir, dan belajar saling berhubungan serta bahasa merupakan fondasi dari segala hubungan manusia.

Dampak dari kebijakan ini mengakibatkan bahasa Inggris diajarkan mulai dari kelas 1 sekolah dasar dan tidak hanya digunakan di dalam mata pelajaran bahasa Inggris saja, tetapi juga pada mata pelajaran lain (kecuali bahasa Filipina) sebagai bahasa pengantar. Pada mata pelajaran bahasa Inggris, kemampuan yang diajarkan kepada peserta didik mencakup kemampuan *listening, speaking, reading, writing, dan viewing*. Penguasaan kemampuan berbahasa ini diukur dalam beberapa tahapan kunci (*key stage standard*), yakni pada kelas 3, kelas 6, kelas 10, dan kelas 12.

1. Kelas 3, peserta didik harus mampu menunjukkan keinginan untuk mengeksplorasi dan mengalami teks lisan dan tulis serta untuk mengomunikasikan makna dan perasaan secara efektif.
2. Kelas 6, peserta didik harus dapat membangun makna dan mengomunikasikannya menggunakan bahasa lisan dan tulisan yang kreatif, tepat, dan benar secara tata bahasa.
3. Kelas 10, peserta didik harus mampu menginterpretasikan, mengevaluasi, dan merepresentasikan informasi di dalam dan di antara teks serta wacana area pembelajaran.

4. Kelas 12, peserta didik harus mampu mengintegrasikan keterampilan komunikasi dan bahasa untuk menciptakan makna menggunakan teks lisan dan tulis, berbagai genre, dan konteks diskursif untuk tujuan pribadi dan profesional.

Meskipun pemerintah Filipina memiliki perhatian yang kuat dalam bahasa Inggris, hal tersebut justru tidak membuat pemerintah Filipina memberikan beban belajar yang banyak kepada peserta didik. Justru yang dilakukan oleh pemerintah Filipina adalah kebalikannya, yakni mengurangi jumlah jam mata pelajaran. Pada jenjang pendidikan menengah, pemerintah Filipina mengurangi dari 5 jam mata pelajaran per minggu menjadi 4 jam mata pelajaran per minggu. Sementara pada jenjang pendidikan dasar, waktu pertemuan pada mata pelajaran bahasa Inggris dikurangi dari 60–90 menit per sesi pertemuan menjadi 30–50 menit per sesi pertemuan. Hal ini dilakukan untuk mempromosikan pembelajaran yang menggunakan bahasa ibu dan pembelajaran pada mata pelajaran lain.

Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pada mata pelajaran lain mulai diterapkan pada kelas 4 sekolah dasar hingga jenjang pendidikan menengah, sedangkan pada kelas 1 sampai dengan kelas 3 bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa ibu. Kebijakan yang diperkenalkan pada *K-12 Language Arts and Multiliteracies Curriculum* ini merupakan kebijakan yang didasarkan pada strategi pembelajaran di mana pembelajaran pada tingkat dasar hanya bisa difasilitasi melalui bahasa ibu.

C. Bangladesh

Bangladesh merupakan negara berkembang di Asia bagian selatan yang berbatasan dengan India di Barat, Utara, dan Timur, Myanmar di Tenggara, serta Teluk Benggala di Selatan. Negara yang memerdekakan dirinya dari Pakistan yang dahulunya merupakan bekas jajahan negara Inggris menggunakan bahasa Bengali atau disebut juga dengan bahasa Bangla sebagai bahasa resminya. Berdasarkan laporan EF 2022, Bangladesh merupakan negara yang kemampuan bahasa Inggris masyarakatnya tergolong ke dalam *low proficiency* dan berada pada peringkat ke-52, akan tetapi masih lebih baik dibandingkan Indonesia yang berada pada peringkat ke-81.

Kebijakan pendidikan bahasa Inggris di Bangladesh terjadi secara pasang-

surut. Pada masa awal kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan, penggunaan bahasa Inggris ditinggalkan dan menjadikan bahasa Bangla sebagai bahasa utama. Akan tetapi, kondisi ini mengakibatkan Bangladesh semakin tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Oleh pemerintahnya, kemudian bahasa Inggris kembali dimasukkan ke dalam struktur pendidikan. Meskipun demikian, pendidikan bahasa Inggris tidak langsung berjalan dengan baik karena adanya ketidakkonsistenan kebijakan seperti perubahan penerapan di kelas 3 kemudian di kelas 6 dan perubahan mata pelajaran menjadi mata pelajaran pilihan ataupun mata pelajaran wajib.

Pada tahun 1997, menjadi tonggak reformasi pendidikan bahasa Inggris di negara ini. Pemerintah Bangladesh mengintegrasikan pendidikan bahasa Inggris dengan pendekatan *Communicative Language Teaching* (CLT). CLT merupakan pendekatan berfokus kepada kompetensi komunikatif di antara pelajar yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Reformasi ini dijalankan melalui program yang bernama *The English Language Teaching Improvement Project* (ELTIP) yang merupakan program besar yang dibiayai oleh pemerintah Bangladesh dan agensi dari Inggris bernama *British Department for International Development* (DFID).

Dampak dari kebijakan ini mengakibatkan permintaan terhadap kebutuhan bahasa Inggris semakin besar dan bahasa Inggris tidak lagi dipandang sebagai literatur, akan tetapi juga kebutuhan sebagai ilmu terapan. Hal ini mendorong universitas untuk membuka jurusan-jurusan bahasa Inggris, baik sebagai ilmu murni maupun sebagai ilmu terapan.

Dari segi struktur kurikulumnya, pemerintah Bangladesh mulai menerapkan pembelajaran bahasa Inggris dari kelas 1 sekolah dasar. Di jenjang pendidikan dasar, beban belajar peserta didik setiap tahunnya lebih ditekankan kepada pembelajaran bahasa Bangla dibandingkan bahasa Inggris. Akan tetapi semakin tinggi jenjang pendidikan, beban belajar terhadap bahasa Bangla semakin dikurangi dan beban belajar bahasa Inggris semakin ditambah.



BAB 4

METODOLOGI KAJIAN DAN PROFIL RESPONDEN

Dalam mendukung rencana penerapan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di tingkat SD, beberapa hal terkait kesiapan perlu dipertimbangkan, seperti terkait situasi kesiapan guru, tenaga kependidikan, modul dan materi pembelajaran, serta sistem pendidikan saat ini dalam rangka menunjang penerapan implementasi program dan juga sebagai dasar informasi untuk menyusun strategi peningkatan kesiapan penerapan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di SD. Sehubungan dengan itu, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) melakukan sebuah kajian mengenai kesiapan implementasi bahasa Inggris. Hasil kajian ini dapat memberikan gambaran mengenai kesiapan satuan pendidikan untuk menerapkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib untuk tingkat SD, strategi untuk meningkatkan kesiapan berdasarkan tingkat kesiapan tersebut, dan upaya peningkatan kompetensi guru SMP/SMK/A untuk mendukung ketersediaan guru bahasa Inggris di tingkat SD.

A. Metodologi Kajian

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *mixed methods* (metode campuran), yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif difokuskan pada variabel aspek penerapan, aspek penyiapan guru dan tenaga kependidikan, serta aspek metode pembelajaran. Untuk pendekatan kuantitatif, beberapa aspek sama dengan kualitatif, tetapi ada penambahan aspek, yaitu kompetensi guru. Pengumpulan data dilakukan sebanyak dua tahap, yaitu tahun 2022 dan 2023. Pada 2022, pengumpulan data dilakukan di 6 kabupaten/kota, yaitu Kota Surabaya, Kab. Sampang, Kota Makassar, Kab. Barru, Kab. Bulungan, dan Kab. Nagekeo dengan total sampel 492 dengan lingkup sekolah dasar, dan untuk 2023, dilakukan di 4 kabupaten/kota, yaitu Kota Samarinda, Kota Ternate, Kab. Lombok Barat, dan Kab. Bandung Barat dengan total sampel 396 satuan pendidikan.

Pendekatan	FGD	Pendekatan
<ul style="list-style-type: none"> • Studi menggunakan <i>mixed-methods</i> • Pengumpulan data: FGD dan survei • Sasaran: daerah dan sekolah yang <u>telah</u> dan <u>belum</u> menerapkan pembelajaran bahasa Inggris pada SD 	<ul style="list-style-type: none"> • Informan: guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan tokoh masyarakat • Lokasi 2022: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Surabaya 2. Kab. Sampang 3. Kota Makassar 4. Kab. Barru 5. Kab. Bulungan 6. Kab. Nagekeo • Lokasi 2023: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Bandung 2. Kota Samarinda 3. Kab Lombok Barat 4. Kota Ternate • Instrumen : Panduan FGD 	<ul style="list-style-type: none"> • Responden: <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Guru yang mengajar Bahasa Inggris</u> atau <u>guru yang diproyeksikan mengajar</u> bahasa Inggris di SD 2. Kepala Sekolah dasar • Lokasi 2022: Kota Surabaya, Kab. Sampang, Kota Makassar, Kab. Barru, Kab. Bulungan, Kab. Nagekeo • Lokasi 2023: Kab. Bandung, Kota Samarinda, Kab Lombok Barat, Kota Ternate • Instrumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuesioner untuk guru dan kepala kekolah 2. Tes kompetensi bahasa Inggris untuk guru

Gambar 3 Ringkasan Desain Kajian

Data kualitatif dikumpulkan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (Diskusi Kelompok Terpimpin/DKT), sedangkan data kuantitatif dikumpulkan melalui survei dengan cara pengisian kuesioner *online*. Responden DKT dipilih dengan sasaran peserta dari daerah dan sekolah yang telah dan belum menerapkan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah mereka. Sementara itu, untuk satuan pendidikan SMP dan SMA, pemilihan daerah berdasarkan responden atau informan DKT yang diundang merupakan stakeholders yang terlibat dalam rencana implementasi kebijakan ini, di antaranya kepala sekolah, guru, dinas pendidikan, kantor Kementerian Agama, pengawas sekolah, orang tua/komite sekolah, serta yayasan sekolah.

Selain DKT dan survei, pengumpulan data dilakukan dengan memberikan tes menggunakan aplikasi EnglishScore yang dirancang oleh *The British Council* yang diunggah melalui *smartphone* masing-masing responden. Tes dilaksanakan secara langsung dan diawasi agar hasilnya relevan dan dapat digunakan untuk mengkaji lebih lanjut kesiapan para responden guru terhadap rencana implementasi kebijakan kewajiban pengajaran bahasa Inggris di tingkat SD serta dapat mengetahui level kompetensi guru yang sudah melakukan pengajaran bahasa Inggris di tingkat SMP, SMA, dan SMK.

B. Profil Satuan Pendidikan

Secara total, terdapat 888 satuan pendidikan yang menjadi sampel kajian, yang terdiri dari 492 satuan pendidikan SD pada kajian tahun 2022 dan 396 satuan pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK pada kajian tahun 2023. Satuan pendidikan tersebut tersebar di sepuluh kabupaten/kota yang terdiri dari empat kota dan enam kabupaten. Dari sampel satuan pendidikan di tahun 2022, 61% sudah melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris. Angka ini lebih besar di sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka (78%) dan di daerah maju (84%).

Tabel 4 Sebaran Sampel Satuan Pendidikan berdasarkan Jenjang di setiap Kabupaten/Kota

Nama Kota/Kabupaten	Tahun Kajian	Jenjang Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menjadi Sampel	
			Total	Per kabupaten/kota
<i>Kota Surabaya</i>	2022	SD	492	109
<i>Kabupaten Sampang</i>				89
<i>Kota Makassar</i>				77
<i>Kabupaten Barru</i>				76
<i>Kabupaten Bulungan</i>				62
<i>Kabupaten Nagekeo</i>				79
<i>Kabupaten Lombok Barat</i>	2023	SMP, SMA, dan SMK	396	92
<i>Kabupaten Bandung Barat</i>				153
<i>Kota Samarinda</i>				108
<i>Kota Ternate</i>				43
Total				888

C. Profil Guru dan Tenaga Kependidikan

Responden kajian tahun 2022 hanya difokuskan kepada guru kelas 3 atau yang akan diproyeksikan mengajar bahasa Inggris di sekolah dasar. Guru yang dipilih merupakan perwakilan dari satuan pendidikan yang sudah dan belum menerapkan pembelajaran bahasa Inggris.

Responden untuk kajian yang dilaksanakan tahun 2023, mayoritas merupakan guru kelas 6 untuk jenjang SD, guru kelas 8 untuk jenjang SMP, dan guru kelas

10 untuk jenjang SMA/SMK. Dilihat dari proporsi keseluruhan, mayoritas guru-guru dari setiap jenjang yang menjadi responden dalam kajian ini merupakan guru tetap. Namun, pola proporsi tersebut tidak berlaku di seluruh jenjang di setiap wilayah kajian ini. Di setiap wilayah terdapat beberapa jenjang di mana proporsi guru tidak tetap melebihi guru tetap, seperti di Kabupaten Bandung (SMP, SMA, dan SMK), Kabupaten Lombok Barat (SD), Kota Samarinda (SD, SMP, dan SMA), dan Kota Ternate (SD dan SMA).

Dari segi latar pendidikan, mayoritas responden adalah lulusan D4/S1 jurusan non Bahasa Inggris, diikuti dengan guru yang memiliki latar belakang pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris dan D4/S1 Bahasa Inggris. Komposisi yang cukup berbeda tampak dari responden yang berasal dari Kota Samarinda. Di kota ini, responden didominasi oleh S1 Pendidikan Bahasa Inggris, D4/S1 Bahasa Inggris, dan D4/S1 jurusan non Bahasa Inggris, dengan selisih yang tidak terlalu jauh berbeda. Dari segi pengalaman kerja, responden guru SD secara keseluruhan didominasi oleh guru yang mengajar lebih dari 10 tahun, begitu pula untuk responden guru SMP dan SMA/SMK.

BAB 5

KESIAPAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK MENERAPKAN BAHASA INGGRIS SEBAGAI MATA PELAJARAN WAJIB DI SEKOLAH DASAR

A. Kondisi Eksisting Penerapan Bahasa Inggris sebagai Mata Pelajaran Wajib di Sekolah Dasar

Mayoritas sekolah yang telah menerapkan pembelajaran bahasa Inggris merupakan sekolah swasta dan sekolah yang berlokasi di kota-kota besar.

Hasil survei kepada kepala sekolah menunjukkan, sebanyak 45,4% satuan pendidikan menyatakan telah menerapkan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah. Perlu menjadi catatan bahwa mayoritas satuan pendidikan yang belum mengimplementasikan bahasa Inggris berasal dari satuan pendidikan negeri dan hanya sedikit sekali satuan pendidikan swasta. Secara nasional, menurut Dapodik, baru sekitar 4% satuan SD/MI di Indonesia yang mengajarkan mata pelajaran bahasa Inggris.

Senada dengan temuan tersebut, hasil DKT tahun 2022 juga menunjukkan bahwa penerapan bahasa Inggris, baik sebagai mata pelajaran wajib maupun muatan lokal, terbatas pada sekolah tertentu saja. Khususnya di Bulungan, penggunaan bahasa Inggris masih terbatas pada sekolah-sekolah swasta. Pada sekolah-sekolah ini, pengajaran bahasa Inggris terjadi mulai di tingkat kelas rendah atau hanya di kelas tinggi saja. Hanya sebagian kecil dari sekolah-sekolah negeri yang menerapkan pengajaran bahasa Inggris, dan hal ini biasanya terjadi di sekolah-sekolah unggulan/terbaik di daerahnya. Penerapan juga umumnya terjadi di sekolah yang berlokasi di kota-kota besar, seperti yang tercakup dalam wilayah DKT Surabaya dan Makassar.

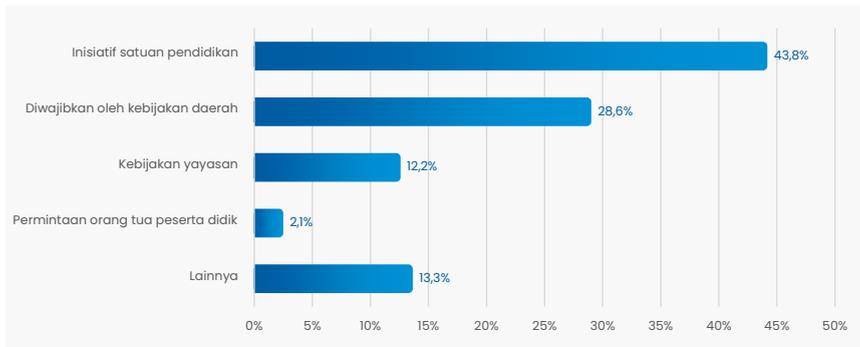
"Di sekolah kami sudah menerapkan bahasa Inggris di jenjang SD kelas 1. Kalau untuk di kelas 1-3 kita menggunakan Buku LKS dan itu diajarkan oleh guru kelas masing-masing. Sedangkan di jenjang tinggi

kelas 4-6 itu ada satu guru memang khusus bahasa Inggris yang mengajarkan di kelas 4-6." (Perwakilan Kepala SD, Kab. Bulungan. Peserta DKT Makassar 2022)

"Kami menggunakan K13, jadi pelajaran ini masuk Mulok dan diberikan pada kelas 4 sampai 6 saja." (Guru SD, Kab. Bulungan. Peserta DKT Makassar 2022)

Inisiatif satuan pendidikan dan mandat kebijakan menjadi alasan utama satuan pendidikan menerapkan pembelajaran bahasa Inggris.

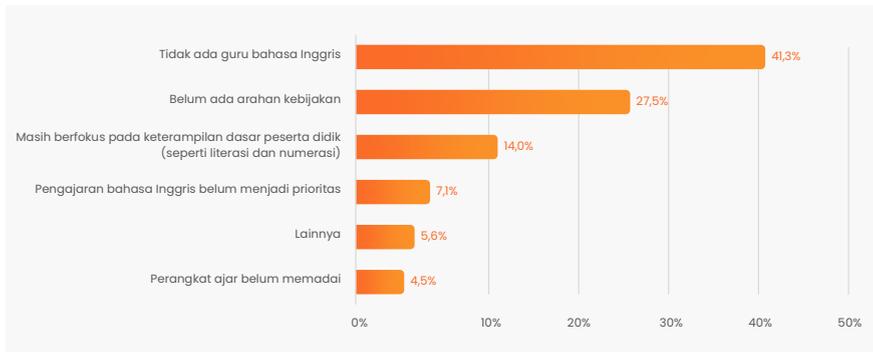
Penerapan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah sangat dipengaruhi oleh inisiatif satuan pendidikan dan kebijakan daerah. Sebanyak 43,8% sekolah yang telah menerapkan pembelajaran bahasa Inggris menyatakan bahwa keputusan mereka menyediakan pembelajaran bahasa Inggris adalah karena inisiatif satuan pendidikan. Sementara itu, 28,6% responden menyatakan adanya instruksi dari kebijakan daerah yang mewajibkan penerapan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah.



Gambar 4 Alasan Utama Penerapan Mata Pelajaran Bahasa Inggris di Satuan Pendidikan

Untuk sekolah-sekolah yang belum menerapkan pembelajaran bahasa Inggris, alasan utama yang dikemukakan adalah karena tidak adanya guru bahasa Inggris. Selain itu, terdapat juga sekolah yang masih belum menjadikan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran prioritas, salah satunya dikarenakan masih berfokus pada peningkatan keterampilan dasar, seperti literasi dan numerasi.

"Di sekolah kami pelajaran bahasa Inggris diberikan mulai kelas 3, karena kelas 1 dan 2 masih menguatkan literasinya. Penekanan pelajarannya masih pada speaking, membaca diajari per kata dulu, sampai mereka memahami. Jika dipaksakan akan terlalu berat bagi anak-anak, karena sebelumnya tidak mengenal sama sekali". (Guru SD, Kab. Bulungan. Peserta DKT Makassar 2022)



Gambar 5 Alasan Utama Satuan Pendidikan Belum Menyelenggarakan Mata Pelajaran Bahasa Inggris

B. Persepsi terhadap Penerapan Bahasa Inggris sebagai Mata Pelajaran Wajib di Tingkat Sekolah Dasar

Guru maupun kepala sekolah setuju pentingnya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran utama dalam kurikulum.

Mayoritas kepala sekolah (95% responden) mengakui pentingnya pengajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran utama dalam kurikulum. Lebih dari 95% guru juga menyatakan setuju terhadap rencana kebijakan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di SD.

"Berbahasa Inggris mendukung komunikasi anak di era global, perangkat teknologi saat ini didominasi oleh bahasa Inggris. Sehingga kebutuhannya sangat mendesak. Bahasa Inggris menumbuhkan kepercayaan diri anak, selain bahasa ibu, mereka bisa menguasai bahasa asing". (Guru SD, Kabupaten Bandung. Peserta DKT Bandung 2023)

Mayoritas kepala satuan pendidikan dan guru setuju dengan kebijakan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di tingkat SD/ sederajat. Guru mendukung dan antusias serta menyambut baik jika mata pelajaran bahasa Inggris diterapkan sebagai mata pelajaran wajib di SD/ sederajat agar dapat mempersiapkan peserta didik menghadapi era globalisasi.

Meski demikian, beberapa kekhawatiran di kalangan guru adalah (1) jumlah jam pelajaran yang akan bertambah, (2) kompetensi guru yang belum memadai, (3) keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran mapel bahasa Inggris, serta (4) masih sedikitnya mapel bahasa Inggris yang sesuai dengan tingkatan peserta didik.



Gambar 6 Persepsi Kepala Sekolah dan Guru terkait Penerapan Bahasa Inggris sebagai Mata Pelajaran Wajib di SD

Selain itu, guru juga setuju bahwa bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib perlu segera diimplementasikan secara bertahap. Para guru mengakui beberapa manfaat signifikan yang mungkin dihasilkan dari kebijakan ini. Salah satunya adalah kemampuan berbahasa Inggris yang memadai bagi lulusan SD, yang memungkinkan mereka mengikuti berbagai kompetisi dan memperkuat minat belajar bahasa Inggris. Pengajaran bahasa Inggris sejak dini di SD juga dipandang esensial untuk membentuk dasar kemampuan berbahasa yang akan berperan penting dalam pendidikan lanjutan.

Masih ada beberapa tantangan dalam penyelenggaraan mata pelajaran bahasa Inggris. Salah satu tantangan dalam penyelenggaraan mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah adalah kejelasan status dan payung hukum terkait pengajaran bahasa Inggris di tingkat SD. Meskipun guru-guru siap dan bersedia mengajarkan bahasa Inggris, jika tanpa payung hukum yang

kelas maka guru berpotensi sulit bertahan dalam jangka panjang. Selain itu, pemetaan sumber daya manusia dan infrastruktur di SD perlu dilakukan agar implementasi kebijakan ini berjalan lancar. Kurangnya guru dengan latar belakang bahasa Inggris di sekolah juga menjadi kendala utama dalam menyelenggarakan pengajaran yang optimal. Di samping itu, tantangan linieritas dalam pengajaran dan tidak memadainya kondisi sekolah, mulai dari sarana-prasarana, ketersediaan perangkat ajar, dukungan orang tua, serta kesiapan dan kemungkinan bertambahnya beban peserta didik juga turut menjadi perhatian. Terakhir yang tidak kalah penting adalah keberagaman kondisi di masing-masing sekolah tidak dapat disamaratakan, sehingga perlu pendekatan yang adaptif dan komprehensif dalam mengatasi masalah ini.

C. Dukungan Kebijakan dan Kerangka Regulasi

Pentingnya regulasi untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris dan memastikan keselarasannya dengan Kurikulum Merdeka.

Terdapat perbedaan pemahaman mengenai keselarasan antara implementasi pembelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib dengan Kurikulum Merdeka.

Beberapa informan menyatakan bahwa implementasi bahasa Inggris secara wajib tidak mengganggu fokus Kurikulum Merdeka terkait pengembangan literasi. Namun, ada pula yang menunjukkan bahwa harmonisasi antara pembelajaran bahasa Inggris dan Kurikulum Merdeka baru sepenuhnya terjadi di Sekolah-Sekolah Penggerak, sementara sebagian besar sekolah masih mengimplementasikan Kurikulum 2013. Meskipun capaian pembelajaran bahasa Inggris di Kurikulum Merdeka dapat berbeda dengan laporan hasil belajar peserta didik, terdapat juga tantangan dalam penyelenggaraan pembelajaran bahasa Inggris di beberapa daerah.

Hal lain yang penting dalam penetapan kewajiban pembelajaran di SD adalah dukungan dari pemerintah daerah. Sebanyak 51,3% kepala sekolah menyatakan bahwa kebijakan saat ini mendukung rencana implementasi pembelajaran bahasa Inggris. Bagi sekolah dasar, pengajaran bahasa Inggris tidak lagi dilakukan karena sifatnya tidak wajib dalam kurikulum nasional.

Beberapa kabupaten dan kota telah mengambil langkah dengan

mengeluarkan kebijakan mengenai penerapan bahasa Inggris di SD dari dinas pendidikan setempat serta Kantor Kementerian Agama. Meskipun begitu, kondisi di beberapa daerah bervariasi, salah satunya adalah daerah masih dalam proses pembuatan kebijakan.

Diperlukannya regulasi yang mendukung proses rekrutmen guru bahasa Inggris melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan pembiayaan melalui BOS reguler.

Salah satu hambatan regulasi dalam penerapan pembelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib adalah tidak adanya aturan mengenai rekrutmen guru bahasa Inggris melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ketidakjelasan rekrutmen ini menyebabkan kendala dalam mencari dan menggaji guru bahasa Inggris yang berkualitas, sehingga berpotensi menghambat implementasi bahasa Inggris di sekolah. Selain itu, kebijakan yang belum mengatur status mata pelajaran bahasa Inggris, menjadikan pelajaran ini masih sebagai pilihan atau muatan lokal di beberapa sekolah. Hal ini berdampak pada dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang tidak dapat dialokasikan untuk pembayaran honor guru bahasa Inggris.

Para informan dari dinas pendidikan dan pengawas mengharapkan adanya regulasi Kemendikbud yang memberikan keleluasaan kepada daerah terkait rekrutmen guru bahasa Inggris melalui P3K serta pembiayaan guru pengajar melalui BOS reguler. Keterbatasan jumlah dan tidak dapat diangkatnya guru P3K untuk mata pelajaran bahasa Inggris, dalam praktiknya menghambat penyelenggaraan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar.

"Kalau bahasa Inggris ini menjadi wajib, kami yang sudah mengajarkan pelajaran ini akan menggeser yang awalnya mulok menjadi mapel wajib. Nah, jika sekolah sulit mendapatkan SDM, maka kebijakan bahasa Inggris ini menghadapi beberapa tantangan seperti ketersediaan SDM guru serta pembiayaannya. Setidaknya jika dana BOS diperkenankan untuk membayar honor, maka bisa jadi hal tersebut menjadi salah satu solusi." (Komite Sekolah, di SD Kabupaten Bulungan. Peserta DKT Makassar 2022)

Regulasi daerah juga perlu jelas dan memadai agar dapat mendukung keberadaan dan peran pengawas. Salah satunya, jumlah pengawas yang

memadai yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran bahasa Inggris di sekolah.

Para informan pengawas juga menegaskan perlunya regulasi daerah yang jelas mengenai peran dan posisi pengawas dalam penerapan kebijakan bahasa Inggris, yang mengacu pada regulasi pusat.

Penyelenggaraan mata pelajaran bahasa Inggris perlu menyelaraskan dengan Kurikulum Merdeka.

Mayoritas responden kepala sekolah (86,9%) menyatakan bahwa kebijakan bahasa Inggris selaras dengan fokus Kurikulum Merdeka yang menekankan pada penguasaan literasi dan numerasi peserta didik. Meski sudah lebih dari setengah responden, masih ada 13,1% yang menyatakan bahwa kebijakan bahasa Inggris wajib di SD tidak selaras dengan fokus Kurikulum Merdeka.

Dalam praktik yang ditemukan di lapangan, penyelenggaraan mata pelajaran bahasa Inggris dan Kurikulum Merdeka ternyata bervariasi di berbagai daerah. Pada umumnya, sebagian besar sekolah swasta maupun negeri masih menerapkan Kurikulum 2013, di mana bahasa Inggris bukan merupakan mata pelajaran wajib di SD. Di sisi lain, bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pilihan dalam Kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, penerapannya disesuaikan dengan sumber daya satuan pendidikan sehingga diharapkan tidak menyulitkan. Hasil DKT 2022 dengan para informan menyimpulkan bahwa kebijakan bahasa Inggris wajib tidak akan mengganggu fokus Kurikulum Merdeka terhadap pengembangan literasi peserta didik. Hal ini karena terdapat pengulangan aktivitas mendengarkan dan berbicara selama pelajaran berlangsung. Kedua aktivitas tersebut dapat merangsang kemampuan literasi peserta didik secara aktif.

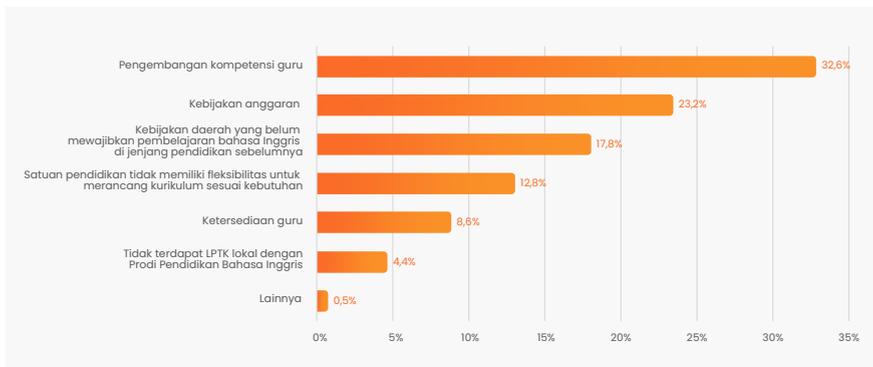
Temuan lain dalam kajian ini adalah baru Sekolah Penggerak (SP) saja yang sepenuhnya mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Satuan pendidikan lain, yang bukan merupakan Sekolah Penggerak, masih menggunakan Kurikulum 2013. Ada juga satuan pendidikan yang mengintegrasikan keduanya; kelas bawah (kelas 1, 2, 3) menggunakan Kurikulum Merdeka dan kelas atas (kelas 4, 5, 6) menggunakan Kurikulum 2013. Dalam hal ini, mapel bahasa Inggris menjadi sepenuhnya bergantung pada kurikulum yang dipakai satuan pendidikan. Namun, status Sekolah Penggerak tidak lantas menjadikan bahasa Inggris menjadi wajib di semua tingkatan kelas, melainkan

hanya di kelas 1 dan 4 saja. Bagi sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013, opsi yang dipakai untuk mengenalkan bahasa Inggris kepada peserta didik adalah melalui ekstrakurikuler dan mapel mulok. Walaupun mayoritas tidak mengajarkan bahasa Inggris. Terakhir, bagi sekolah yang mengintegrasikan kedua kurikulum, pembelajaran bahasa Inggris biasanya tergantung pada ketersediaan sumber daya manusia dan finansial yang dimiliki satuan pendidikan, terlebih yang bertempat di daerah yang jauh dengan ibukota.

Dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan bahasa Inggris sangat berkaitan dengan kurikulum yang diterapkan. Temuan di atas memberikan gambaran bahwa Kurikulum Merdeka telah menjadi alternatif yang relevan untuk menyelenggarakan pembelajaran bahasa Inggris wajib, meskipun masih diintegrasikan dengan kurikulum yang lebih lama. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan integrasi yang lebih baik, maka perlu adanya pendekatan untuk mencapai keseragaman dalam konteks pengadaan bahasa Inggris wajib di SD. Dengan demikian, seluruh peserta didik dapat mendapatkan manfaat dari kebijakan ini.

Sistem penempatan guru bahasa Inggris yang tidak sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan menjadi salah satu kendala.

Hasil DKT dengan satuan pendidikan menemukan bahwa sistem penempatan guru bahasa Inggris di satuan pendidikan kurang teratur. Satuan pendidikan yang ketersediaan guru bahasa Inggrisnya sudah relatif memadai justru mendapatkan penambahan guru bahasa Inggris kembali, sedangkan pada satuan pendidikan yang kekurangan guru bahasa Inggris tidak mendapatkan penambahan/penyediaan guru baru. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan distribusi sumber daya pendidikan, terutama dalam kualitas pembelajaran bahasa Inggris di berbagai satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang memiliki ketersediaan guru bahasa Inggris yang relatif memadai mengalami pemborosan sumber daya, sementara satuan pendidikan lain terus mengalami kekurangan tenaga pengajar. Temuan ini menjadi salah satu contoh kebijakan pemerintah daerah yang perlu diperbaiki karena tidak mendukung implementasi pembelajaran bahasa Inggris wajib.



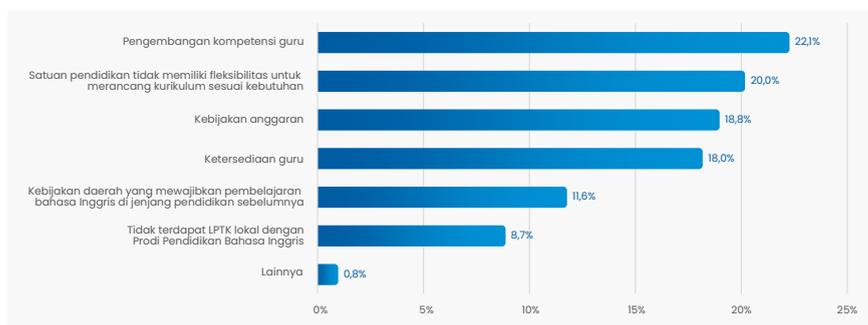
Gambar 7 Kebijakan yang Belum Mendukung Penyelenggaraan Pembelajaran Bahasa Inggris menurut Persepsi Kepala Sekolah

"Lalu yang kedua, kami jujur murid kami sedikit hanya 30 lebih, honorer sudah banyak, seandainya kalau mau masuk guru dengan latar belakang bahasa Inggris itu akan overload," (Hasil DKT dengan Kepala Sekolah dan Pengawas, 13 Desember 2022)

Selain jumlah penempatan guru yang tidak sesuai kebutuhan, survei kuantitatif kepada kepala sekolah di jenjang SMP dan SMA juga menemukan beberapa alasan lain yang dapat menjadi penghambat penyelenggaraan pembelajaran bahasa Inggris wajib di tingkat SD: 1) masih belum optimalnya pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan peningkatan kapasitas tenaga pengajar; 2) kebijakan anggaran belum memadai karena alokasi penggunaan dana BOS yang tidak fleksibel; 3) kurangnya dukungan karena kebijakan daerah yang belum mewajibkan pembelajaran bahasa Inggris di jenjang pendidikan sebelumnya; 4) kurangnya fleksibilitas dalam merancang kurikulum sesuai kebutuhan sekolah untuk menentukan JP mata pelajaran; 5) keterbatasan jumlah tenaga kerja atau guru sehingga menghambat peningkatan JP. Jika satuan pendidikan tidak memiliki cukup guru untuk mengajar bahasa Inggris, maka satuan pendidikan tidak bisa meningkatkan intensitas pembelajaran bahasa Inggris sesuai kebutuhan peserta didik; dan 6) ketidakterediaan LPTK dengan program studi Bahasa Inggris di daerah setempat juga menghambat penyediaan tenaga pengajar yang berkualifikasi di daerah tersebut. Kurangnya fokus pada prodi Bahasa Inggris di LPTK

berdampak pada pelatihan calon guru, sehingga menghambat rencana implementasi bahasa Inggris di SD karena jumlah tenaga pengajar dan kualitas pengajarannya yang kurang memadai.

Dalam aspek kompetensi guru, penyediaan kebijakan dinilai masih belum mencukupi karena responden guru merasa bahwa kuantitas maupun kualitas guru bahasa Inggris masih belum memadai. Masih ada beberapa guru dengan kemampuan yang kurang di beberapa aspek, yaitu kreativitas, pengelolaan kelas, dan penguasaan substansi bahasa Inggris. Hal ini disebabkan karena belum adanya kebijakan spesifik untuk peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan untuk guru bahasa Inggris.

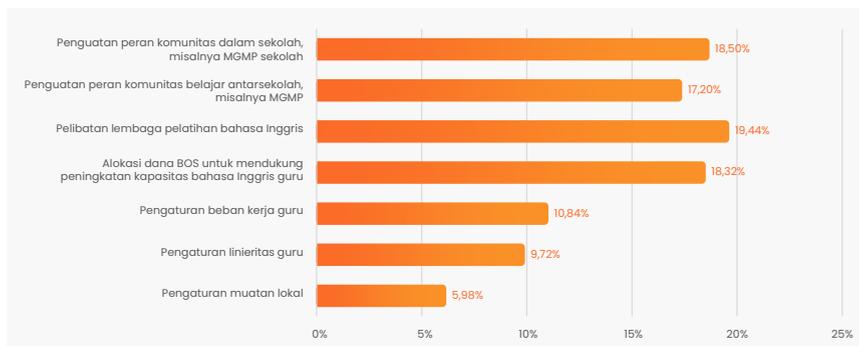


Gambar 8 Kebijakan yang Dapat Mendukung Implementasi Pembelajaran Bahasa Inggris Menurut Persepsi Guru

Urgensi perlunya kebijakan yang mendukung pengembangan kapasitas guru.

Para responden yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah tentang peningkatan kapasitas kemampuan bahasa Inggris masih belum mencukupi menganggap bahwa penyesuaian terhadap kebijakan yang ada saat ini perlu dilakukan. Perlu ada penyesuaian kebijakan terkait beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas, seperti perlunya melibatkan lembaga pelatihan bahasa Inggris (19.4%), serta perlunya penguatan peran komunitas belajar dalam sekolah seperti MGMP sekolah (18,5%). Hasil ini selaras dengan temuan diskusi di Kota Samarinda, bahwa komunitas belajar intra sekolah dapat dioptimalkan dengan melibatkan narasumber/mentor guru yang menguasai kompetensi pedagogik dan materi pembelajaran bahasa Inggris yang baik. Selain itu, responden juga menekankan perlunya

mengalokasikan dana BOS untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris, perlunya penguatan peran komunitas belajar antarsekolah seperti MGMP, perlu adanya pengaturan beban kerja guru, serta perlu adanya pengaturan linieritas guru.



Gambar 9 Dukungan Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan Kapasitas Kemampuan Bahasa Inggris Guru yang Dinilai Masih Kurang

D. Kesiapan Guru Sekolah Dasar untuk menerapkan Bahasa Inggris sebagai Mata Pelajaran Wajib

Keterbatasan jumlah guru dengan latar belakang pendidikan bahasa Inggris menjadi salah satu kendala terbesar.

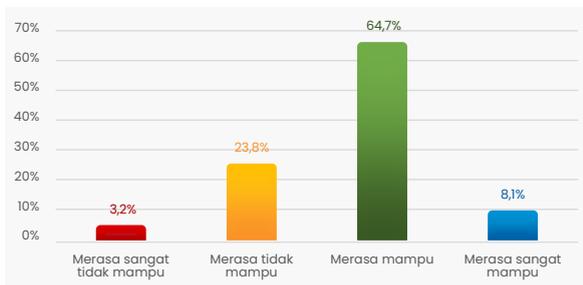
Berdasarkan hasil diskusi DKT Surabaya dan Makassar di tahun 2022, diketahui bahwa faktor utama bahasa Inggris belum diterapkan di tingkat SD adalah keterbatasan jumlah guru SD dengan latar belakang pendidikan bahasa Inggris. Banyak sekolah menghadapi kesulitan dalam menemukan guru yang memiliki kompetensi bahasa Inggris, sehingga seringkali pembelajaran bahasa Inggris diampu oleh guru kelas dengan kualifikasi PGSD. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pengajaran, terutama pada fase awal penguasaan bahasa di fase A.

"Sejauh ini, sekolah masih mengalami kendala dalam merekrut guru bahasa Inggris dengan kompetensi yang sesuai, salah satunya memiliki latar belakang pendidikan bahasa Inggris. Selain itu, anggaran untuk merekrut guru bahasa Inggris sangat terbatas bahkan dapat dikatakan tidak ada" (Hasil DKT dengan Kepala Sekolah dan Pengawas, 13 Desember 2022)

Bertambahnya beban kerja serta kurangnya kompetensi guru dalam mengajar sebagai beberapa kekhawatiran dalam penyelenggaraan mata pelajaran bahasa Inggris.

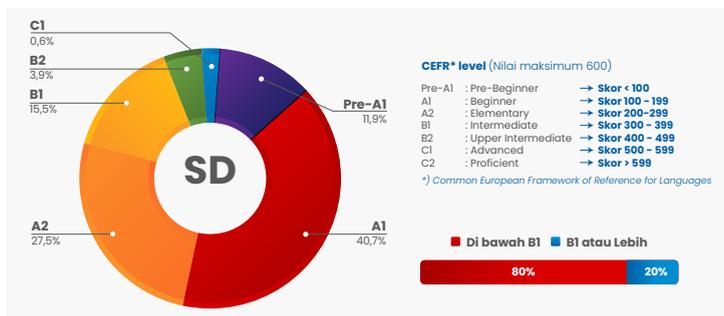
Aspek yang juga perlu diperhatikan adalah terkait ketidaksiapan sekolah dalam merekrut guru, utamanya pada sekolah-sekolah negeri. Keterbatasan anggaran menyebabkan sulitnya melakukan rekrutmen guru dengan latar belakang bahasa Inggris. Implikasinya, sekolah memberdayakan guru yang berperan sebagai wali kelas untuk merangkap tugas sebagai pengampu mata pelajaran bahasa Inggris, padahal keputusan tersebut berpotensi menghambat pembelajaran karena keterbatasan keterampilan berbahasa Inggris. Selain itu, meskipun yayasan telah mengambil inisiatif dengan menyediakan panduan dan bimbingan kepada guru-guru dalam rangka penguatan lebih lanjut dalam mendukung pengajaran bahasa Inggris di tingkat SD tetap diperlukan.

Pengaturan beban kerja guru di satuan pendidikan juga menjadi salah satu implikasi dari penyelenggaraan mata pelajaran bahasa Inggris. Lebih dari 80% guru menyatakan adanya pengaturan beban kerja guru di satuan pendidikan dan kurang dari 20% menyatakan sebaliknya. Pemenuhan beban kerja guru dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam kaitannya dengan implementasi pembelajaran bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar, guru memandang hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pengaturan beban kerja guru. Penyesuaian waktu, terutama saat seorang guru kelas beralih menjadi guru bahasa Inggris, memunculkan pertimbangan terkait distribusi jam pelajaran.



Gambar 10 Persepsi Responden Guru SD terhadap Kemampuan Mengajarkan Materi Mata Pelajaran Bahasa Inggris di Tingkat SD

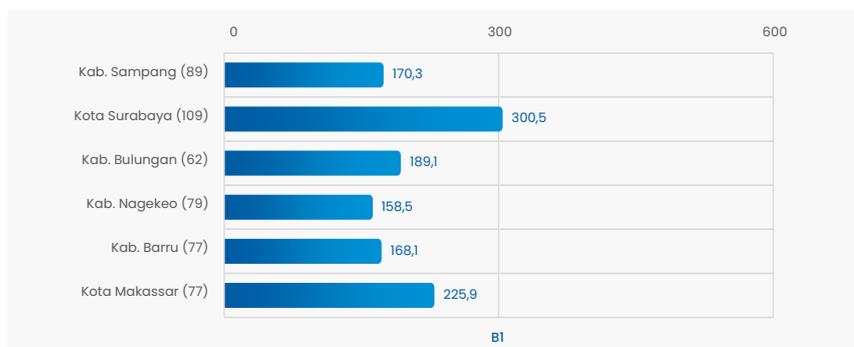
Terkait kompetensi guru SD dalam mengajarkan mata pelajaran bahasa Inggris, lebih dari 70% guru menyatakan mampu menguasai materi pembelajaran bahasa Inggris serta mengajarkannya kepada peserta didik SD. Meskipun demikian, hasil tes bahasa Inggris menunjukkan kemampuan bahasa Inggris dari 80% dari 492 guru SD yang mengikuti tes bahasa Inggris masih berada di level A1 (*Beginner*). Tes ini dilakukan menggunakan platform EnglishScore yang tidak mencakup kemampuan berbicara (*speaking*). Tes tersebut menguji kemampuan bahasa Inggris guru secara umum, tetapi tidak mencakup tes kemampuan guru untuk mengajar bahasa Inggris secara efektif. Tes dilakukan kepada 492 guru untuk Kajian Kesiapan Bahasa Inggris sebagai Mata Pelajaran Wajib di SD/Sederajat tahun 2022.



Gambar 11 Nilai Tes Kemampuan Bahasa Inggris Guru SD

Terdapat disparitas kemampuan bahasa Inggris guru berdasarkan usia, kualifikasi, peran, dan status sekolah. Berdasarkan usia, guru dari kelompok usia 30-39 dan 40-49 tahun memperoleh skor tes bahasa Inggris lebih rendah dibandingkan dengan guru muda yang berada di kelompok usia 29 tahun atau kurang. Dari sisi pendidikan terakhir dan status satuan pendidikan, guru dengan pendidikan D4/S1-S3 bahasa Inggris memperoleh skor tes bahasa Inggris yang lebih tinggi dibandingkan guru dengan pendidikan D4/S1-S3 non-bahasa Inggris, sementara itu guru SD negeri memperoleh skor tes bahasa Inggris yang lebih rendah dibandingkan dengan guru SD swasta. Dari sisi status, guru yang merupakan pengampu mata pelajaran bahasa Inggris memperoleh skor tes bahasa Inggris yang lebih tinggi dibandingkan guru kelas. Selain hal-hal tersebut, jenis kelamin dan status kepegawaian guru tidak berpengaruh secara signifikan terhadap skor tes bahasa Inggris yang didapatkan.

Berdasarkan wilayah, rata-rata nilai guru yang berdomisili di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan guru yang berdomisili di kabupaten. Kota Surabaya mencatat rata-rata nilai tertinggi mencapai 300,55 poin dan diikuti oleh Kota Makassar yang mencapai 225,88 poin.



Gambar 12 Nilai Tes Kemampuan Bahasa Inggris Guru SD berdasarkan Wilayah

Latar belakang pendidikan guru dianggap menjadi hal penting. Hasil diskusi menyimpulkan bahwa sebagai pendidik, para guru yang merupakan peserta DKT mengakui memiliki kapasitas untuk mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Namun, akan lebih baik jika guru yang dipilih menjadi pengampu mata pelajaran merupakan guru yang memang berlatar belakang bahasa Inggris karena linieritas keilmuan dan kapasitas guru dalam mengajar. Secara umum, guru memang memiliki kemampuan pedagogik yang cukup baik, tetapi untuk keterampilan mengajar bahasa Inggris, tidak semua guru memiliki kapasitas tersebut secara memadai. Hal yang berbeda terjadi pada guru-guru dengan latar belakang pendidikan bahasa Inggris, memiliki kepercayaan diri yang lebih baik dalam mengajar. Sementara guru-guru yang kurang memadai, jika harus membantu mengajar, maka ada kecenderungan mereka akan memilih mengajar di kelas bawah dengan tingkat kesulitan lebih rendah. Guru yang tidak kompeten mengajar akan berimbas kepada peserta didik.

"Di sekolah kami sejak awal mengajarkan bahasa Inggris, jadi memiliki sumber daya pengajar yang memadai. Saya bukan lulusan bahasa Inggris, tetapi saya pernah kursus hingga lulus sehingga saya juga terlibat mengajar pelajaran ini." (Guru SD, Kab. Bulungan)

E. Kesiapan Peserta Didik

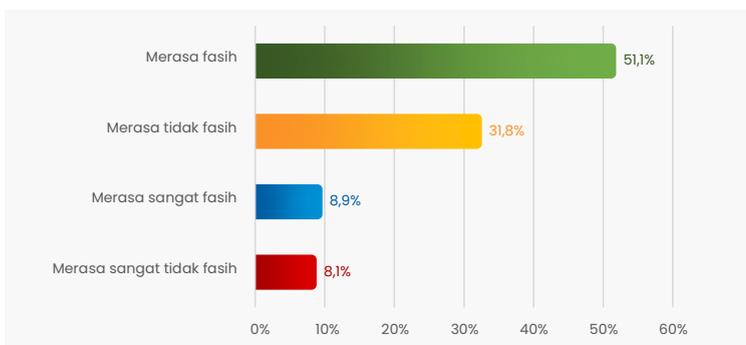
Analisis dari temuan kualitatif menunjukkan bahwa guru berpendapat jika peserta didik memiliki kesiapan yang cukup untuk mempelajari bahasa Inggris di tingkat SD. Terdapat beberapa alasan mendasar yang mendukung keyakinan ini. Peserta didik menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap pembelajaran, terutama ketika materi diajarkan dengan konteks yang relevan dan melalui metode interaktif. Keterlibatan yang positif ini menjadi modal penting dalam pembelajaran bahasa Inggris. Selain itu, keberadaan peserta didik di jenjang sekolah dasar memungkinkan daya serap belajar yang cepat, memberi peluang bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan bahasa baru dengan efektif.

Kemampuan berbahasa Inggris peserta didik di jenjang SD memiliki peranan penting terhadap kemampuan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris di jenjang berikutnya. Akan tetapi, penerapan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di tingkat SD juga perlu memperhatikan beban belajar peserta didik. Saat ini, banyak peserta didik yang belum menguasai keterampilan literasi dan numerasi dasar. Diketahui satu dari dua peserta didik di Indonesia belum mencapai kompetensi minimum literasi dan dua dari tiga peserta didik belum mencapai kompetensi minimum numerasi (Sailar, 2023).

"Di sekolah kami pelajaran bahasa Inggris diberikan mulai kelas 3, karena kelas 1 dan 2 masih menguatkan literasinya. Penekanan pelajarannya masih pada speaking, membaca diajari per kata dulu, sampai mereka memahami. Jika dipaksakan akan terlalu berat bagi anak-anak, karena sebelumnya tidak mengenal sama sekali." (Eka - Guru SDN 008 Tanjung Selor, Kab. Bulungan)

Transisi dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia masih menjadi tantangan, terlebih apabila peserta didik harus mempelajari bahasa lain.

Data survei menunjukkan bahwa hampir 40% peserta didik merasa fasih dalam berbahasa Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang lebih memahami penggunaan bahasa ibu sebagai alat berkomunikasi sehari-hari. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa Indonesia memengaruhi kemampuan dalam bahasa Inggris karena mendukung pemahaman konsep bahasa dan struktur kalimat.



Gambar 13 Persepsi Guru Sekolah Dasar terhadap Kefasihan Berbahasa Indonesia Peserta Didik

Seperti halnya hasil DKT 2022 dengan kepala sekolah, hasil DKT dengan para guru juga menemukan hasil yang serupa. Seorang informan dari kabupaten Nagekeo dalam DKT 2022 menyatakan kekhawatiran yang muncul. Hal ini disebabkan keseharian peserta didik banyak menggunakan bahasa daerah, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Penambahan pelaksanaan kebijakan mata pelajaran bahasa Inggris dikhawatirkan akan menjadi beban tambahan peserta didik dan orang tua. Selain itu, beberapa informan di DKT tahun 2023 juga mengemukakan kekhawatiran yang berkaitan dengan bahasa yang akan dikuasai peserta didik di fase awal. Menurut mereka, dapat terjadi kebingungan pelafalan kata, terutama jika penerapan bahasa Inggris akan dilakukan di kelas rendah, di mana peserta didik masih dalam fase penyesuaian antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah (bahasa Ibu).

Hasil survei menunjukkan, 63,6% kepala sekolah menilai bahwa peserta didik di satuan pendidikannya sudah fasih berbahasa Indonesia. Meski demikian, survei ini tidak sepenuhnya representatif bagi seluruh Indonesia. Satuan pendidikan di daerah-daerah jauh dari ibukota lebih banyak menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari, seperti yang dikutip dari salah satu kepala sekolah di Ternate: *"Bahasa ibu lebih banyak digunakan (oleh peserta didik kami)"*, sehingga tingkat kefasihan berbahasa Indonesia di daerah tersebut mungkin berbeda. Kendala ini menyiratkan adanya kemungkinan kesulitan dalam berbahasa Indonesia yang tidak terefleksi dalam survei karena daerah-daerah pedesaan atau terpencil tidak termasuk dalam sampel survei tersebut.

Meskipun ada kekhawatiran seputar potensi kebingungan di fase awal, di mana pentingnya penguasaan literasi dan numerasi masih ditekankan, guru memiliki pandangan yang kuat bahwa peserta didik memiliki kapasitas adaptasi yang kuat. Dengan pendekatan pembelajaran yang terarah dan berfokus pada konteks, peserta didik mampu mengatasi tantangan awal dan mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris secara bertahap. Dengan demikian, perpaduan antara antusiasme peserta didik, kemampuan daya serap, dan pengajaran yang terarah menciptakan landasan kuat bagi implementasi bahasa Inggris di sekolah dasar, dengan pemahaman akan poin penting dalam fase awal penguasaan bahasa ini.

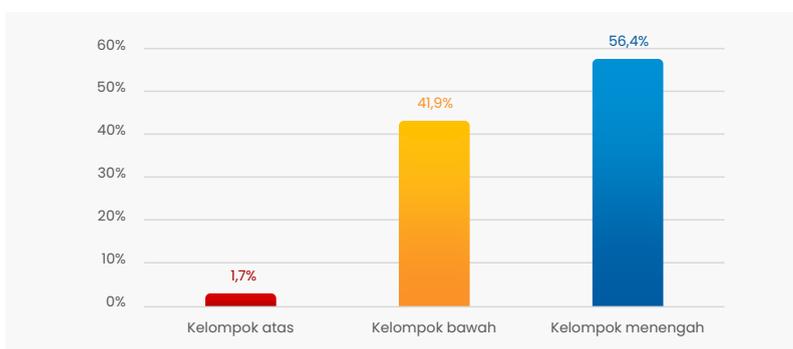
Hasil dari analisis data lapangan juga menunjukkan bahwa guru menilai peserta didik SD memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menyerap kosakata bahasa Inggris dan mampu mengingatnya dengan baik. Antusiasme mereka terhadap pelajaran ini juga sangat tinggi sehingga menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Selain itu, pengenalan bahasa Inggris dapat memberikan kepercayaan diri lebih dalam berkomunikasi dengan wisatawan asing, mengembangkan keterampilan berbicara, mendukung keterlibatan dalam kompetisi bahasa Inggris, dan mendapatkan dukungan positif dari orang tua.

Dukungan orang tua terhadap pembelajaran bahasa Inggris di rumah bervariasi bergantung pada latar belakang ekonomi dan pendidikan.

Hasil olahan kualitatif mengenai kesiapan dan dukungan orang tua dalam pembelajaran peserta didik di rumah menunjukkan variasi serta kualitas keterlibatan orang tua dalam pembelajaran. Orang tua pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mendampingi anak dalam pembelajaran bahasa Inggris di rumah melalui teknologi yang tersedia. Namun, tingkat dukungan ini bervariasi berdasarkan latar belakang ekonomi dan pendidikan orang tua. Beberapa orang tua dari kalangan ekonomi menengah ke atas merasa siap untuk mendukung pembelajaran peserta didik di rumah, bahkan termotivasi untuk memahami bahasa Inggris guna mendukung proses pembelajaran anak di rumah. Di sisi lain, orang tua dengan latar belakang ekonomi rendah harus bekerja dan merasa tidak sempat untuk mendampingi anak belajar di rumah, sehingga mereka menyerahkan pembelajaran sepenuhnya kepada guru di sekolah. Hal serupa juga terdengar dari orang tua yang tidak memiliki pendidikan tinggi, terlebih yang tidak bisa berbahasa Inggris. Oleh karena

itu, meskipun terdapat keinginan untuk mendampingi anak belajar di rumah, tetapi hal itu tidak bisa direalisasikan karena kurangnya keterampilan dan terdapat keterbatasan waktu.

Ketersediaan dukungan orang tua terhadap pembelajaran di rumah menjadi suara minoritas berdasarkan diskusi kualitatif. Hal ini dibuktikan dengan survei kuantitatif, di mana berdasarkan perspektif guru, sebanyak 98,3% peserta didik di SD-nya berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi kelas menengah ke bawah. Sementara itu, hanya 1,7% saja peserta didik yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi atas (*financially capable*). Hasil yang sama juga terjadi untuk peserta didik di jenjang SMP/SMA/SMK.



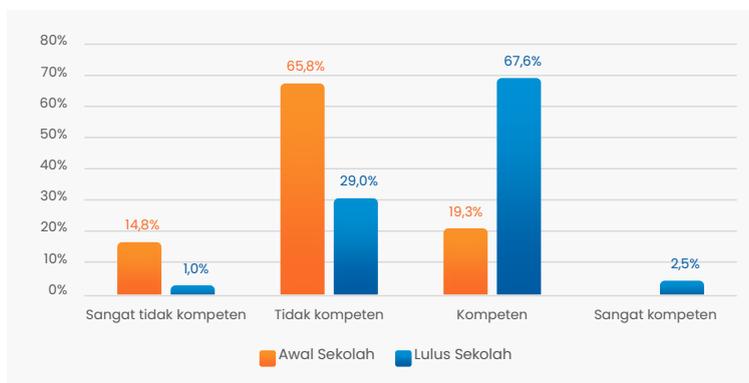
Gambar 14 Persepsi Guru terhadap Latar Belakang Ekonomi Keluarga Peserta Didik di Sekolah Dasar yang Mereka Ajar

Kemampuan bahasa Inggris di tingkat SD memberikan pengaruh pada kemampuan bahasa Inggris di tingkat SMP/SMA/SMK.

Berdasarkan hasil diskusi dengan berbagai stakeholders satuan pendidikan, disimpulkan bahwa kompetensi bahasa Inggris untuk peserta didik SMP/SMA/SMK cukup beragam tergantung dari apakah peserta didik mendapatkan pelajaran bahasa Inggris di satuan pendidikan jenjang sebelumnya. Salah satunya informasi dari kepala sekolah di MTS Bandung yang menyatakan bahwa, "Karena inputnya macam-macam ada dari SDN, SDIT dsb., maka kemampuan peserta didik bervariasi tergantung ada atau tidaknya bahasa Inggris di sekolah asalnya.". Hal ini juga berpengaruh pada kompetensi bahasa Inggris peserta didik ketika lulus, karena sejak awal peserta didik memiliki kompetensi yang berbeda. Namun, peserta didik yang belum memiliki dasar

yang kuat dalam bahasa Inggris mungkin akan mengalami kesulitan dalam memahami materi dan berkomunikasi di tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Terkait kompetensi berbahasa Inggris, 14,8% responden kepala sekolah SMP/ SMA/SMK menyatakan peserta didiknya di awal masuk sekolah memiliki kemampuan yang sangat tidak memadai. Namun, setelah lulus, jumlah peserta didik yang sangat tidak kompeten mengalami penurunan menjadi 1,0%. Selain itu, penilaian untuk peserta didik yang tidak kompeten juga menurun dari ketika awal sekolah yaitu 65,8% menjadi hanya 29,0% ketika lulus sekolah. Peserta didik yang ketika awal sekolah sudah kompeten (19,3%) mengalami peningkatan kompetensi ketika lulus (67,6%). Di sisi lain, responden kepala sekolah tidak ada yang menilai peserta didiknya sangat kompeten berbahasa Inggris ketika awal masuk sekolah, tetapi ketika lulus, terdapat peserta didik yang dinilai sangat kompeten sebesar 2,5%.



Gambar 15 Kompetensi Peserta Didik dalam Berbahasa Inggris Ketika Awal Sekolah dan Lulus Sekolah

F. Dukungan Materi dan Metode Pembelajaran

Perlu nya penyediaan perangkat pembelajaran yang memadai.

Perihal kesiapan sumber daya sekolah dalam mendukung implementasi bahasa Inggris di SD, seluruh informan DKT di berbagai daerah sepakat bahwa sumber daya di sekolah belum sepenuhnya memadai, terutama terkait dengan kurangnya buku yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini mengindikasikan perlunya lebih banyak upaya dalam menyediakan materi yang sesuai. Penting juga untuk menyediakan perangkat pembelajaran

seperti modul, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), serta media ajar lainnya. Selain itu, karena bahasa Inggris masih bersifat pilihan, alokasi anggaran untuk bahan ajar dan fasilitas pendukung masih belum memadai.

Di beberapa sekolah, perangkat pembelajaran untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris sudah tersedia berkat bantuan dari pemerintah atau inisiatif penyediaan oleh satuan pendidikan.

Sejumlah sekolah di Kabupaten Bulungan telah mendapatkan bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dari pemerintah pusat untuk mendukung pembelajaran multimedia di kelas, yang juga dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris. Tidak hanya itu, beberapa yayasan di kabupaten yang sama juga telah mengambil langkah proaktif dengan menyediakan modul ajar yang dapat dikembangkan oleh setiap sekolah yang mereka bantu, seperti yang dilakukan oleh Yayasan Muhammadiyah dengan mengalokasikan anggaran dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas guru. Informan DKT dari Bali dan Berau juga mengemukakan sudah memiliki modul ajar yang dibuat sendiri oleh komunitas guru (KKG) di daerah setempat.

"...[di PMM] ada modul bahasa Inggris. Modul ajar ada. Ada video. Kalau ketersediaan sumber belajar, sarana. Kalau di kita SD SMP ini di Kabupaten Bulungan, 70% sekolah itu sudah ada mendapat bantuan TIK yang macam chromebook itu..." (Analisis Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan)

BAB 6

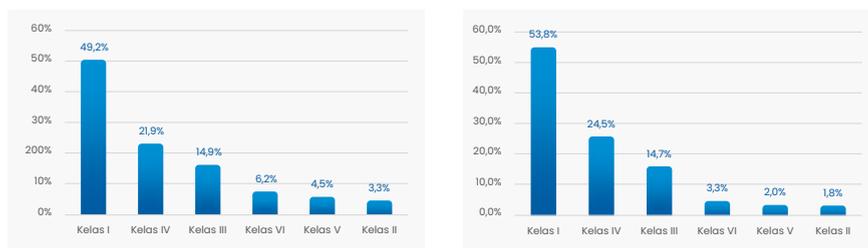
STRATEGI MENINGKATKAN KESIAPAN PENERAPAN BAHASA INGGRIS SEBAGAI MATA PELAJARAN WAJIB DI TINGKAT SEKOLAH DASAR

A. Kapan Sebaiknya Bahasa Inggris Diterapkan di Sekolah Dasar

Bahasa Inggris sebaiknya diterapkan mulai dari kelas 1 atau 3, sejalan dengan penerapan Kurikulum Merdeka.

Perspektif guru dan kepala sekolah mengenai tingkatan kelas yang seharusnya memulai penerapan bahasa Inggris bervariasi. Berdasarkan hasil DKT, dari sudut pandang para guru, pemilihan tingkatan kelas yang seharusnya memulai penerapan pembelajaran bahasa Inggris memunculkan berbagai perspektif yang penuh pertimbangan. Beberapa pendapat mengarah pada fase awal, yaitu Fase A, yang mencakup kelas 1 dan 2. Hal ini karena pandangan bahwa pada fase ini, peserta didik memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam menyerap pengenalan dan pembiasaan bahasa Inggris. Guru-guru yang mendukung fase ini berpendapat bahwa pembelajaran dari usia dini akan lebih memudahkan anak-anak beradaptasi dengan bahasa asing. Namun, tantangannya adalah menciptakan teknik pembelajaran yang sesuai untuk mengatasi potensi kebingungan pelafalan, dan asesmen yang efektif dalam mengukur kemajuan bahasa peserta didik, terutama di kelas awal.

Di sisi lain, terdapat juga pandangan yang mengarah pada fase B, melibatkan kelas 4, dan 5. Alasannya adalah bahwa peserta didik pada fase ini telah memiliki kesiapan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) yang lebih baik sehingga lebih siap dalam menghadapi materi bahasa Inggris yang lebih kompleks. Namun, para guru yang mendukung fase ini perlu memastikan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan perkembangan dan kemampuan peserta didik. Mereka beralasan bahwa fase A itu hendaknya lebih difokuskan untuk belajar calistung dan bahasa Indonesia sehingga bahasa Inggris baru bisa diterapkan pada kelas 3 atau fase B.



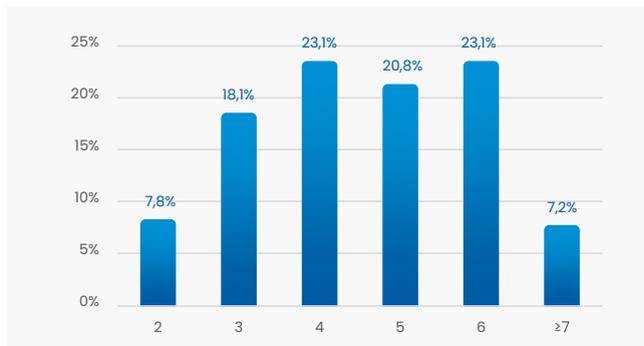
Gambar 16 Tingkatan Kelas yang Seharusnya Mulai Ditetapkan Bahasa Inggris Menurut Guru SD (kiri) dan Kepala Sekolah SD (kanan)

Senada dengan pendapat tersebut, para akademisi juga menyarankan bahasa Inggris mulai diterapkan pada fase B karena anak-anak baru beradaptasi dengan bahasa Indonesia di kelas 1 dan 2. Akan tetapi, peserta didik dapat mulai disiapkan mengikuti kegiatan pengenalan bahasa atau *language rich environment* mulai dari kelas rendah. Sebaiknya juga diberi kebebasan bagi sekolah yang ingin menerapkan pembelajaran bahasa Inggris mulai dari kelas rendah.

"Usulan, pertama untuk anak-anak kelas awal (kelas 1 dan 2), jangan banyak intervensi karena mereka harus diperkuat dulu literasi dasarnya. Mungkin untuk bahasa Inggris bisa dimulai dari kelas 3, kelas 1 dan 2 fokus pada literasi dasarnya dahulu. Kami juga sedang membuat penggunaan bahasa Ibu ke dalam pembelajaran. Ini juga jangan sampai ada bahasa Ibu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris akhirnya saling berbenturan. Sehingga menurut saya untuk bahasa Inggris kebijakannya mulai dari kelas 3." (DKT Guru di Nagakeo)

Terdapat pula usulan mengenai pembelajaran bahasa Inggris seharusnya dimulai bahkan dari tingkat PAUD. Kendati demikian, keputusan mengenai tingkatan kelas ini harus mempertimbangkan faktor-faktor, seperti perkembangan peserta didik, metode pembelajaran yang efektif, serta tujuan jangka panjang pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar.

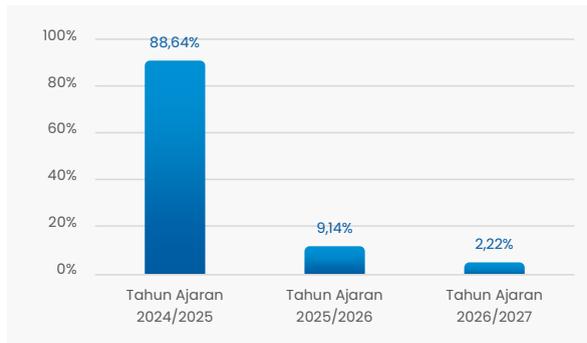
Selain itu, kepala sekolah juga ditanyakan mengenai jumlah rombongan belajar (rombel) ideal yang harus diajar oleh seorang guru bahasa Inggris. Sebanyak 23,1% menjawab 4 rombel dan 6 rombel. Dua opsi ini disusul oleh 20,8% kepala sekolah yang menyatakan 5 rombel sebagai jumlah rombel ideal.



Gambar 17 Jumlah Rombongan Belajar Ideal yang Harus Diajar oleh Seorang Guru Bahasa Inggris Menurut Responden Kepala Sekolah

Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di tingkat SD sebaiknya diterapkan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan guru di masing-masing sekolah.

Responden menyatakan bahwa penerapan bahasa Inggris di tingkat SD sebaiknya dilakukan dengan segera. Lebih dari 85% kepala sekolah yang menjadi responden menyatakan tahun ajaran 2024/2025 adalah waktu yang tepat untuk menerapkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib.



Gambar 18 Kapan Sebaiknya Penerapan Bahasa Inggris di SD Dapat Diterapkan Menurut Responden Kepala Sekolah SD

Tanpa mengurangi semangat dari para guru dan kepala sekolah untuk menerapkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di tingkat SD, penerapan ini sebaiknya dilakukan dengan segera secara bertahap untuk

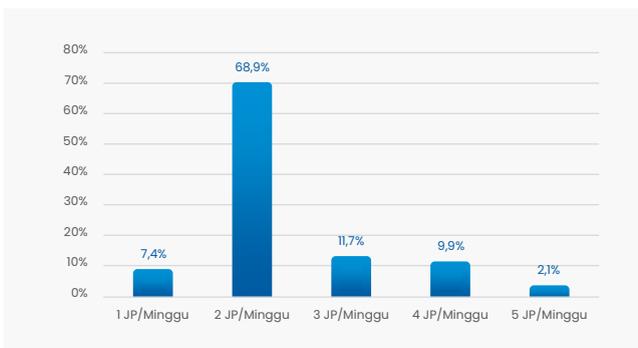
memastikan satuan pendidikan memiliki kapasitas yang diperlukan. Artinya, sekolah yang sudah siap dari segi ketersediaan guru, kompetensi guru, serta perangkat ajar pendukung lainnya dapat dengan segera menerapkan pembelajaran bahasa Inggris.

"Implementasi kewajiban bahasa Inggris perlu bertahap dan mencontoh implementasi Kurikulum Merdeka, sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan, jangan serentak." (Kepala Sekolah, Kota Surabaya)

B. Bagaimana Sebaiknya Penerapan Bahasa Inggris di Tingkat Sekolah Dasar Dilakukan

Usulan alokasi jam pelajaran bahasa Inggris di SD adalah 2 JP/minggu.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan jam pelajaran ini adalah materi yang tidak terlalu padat dan tidak mengurangi jam mata pelajaran lain. Guru berpendapat alokasi 2 JP sudah cukup tanpa mengurangi jam mata pelajaran lain, tapi ada usulan penambahan JP untuk kelas rendah. Jika jam pelajaran bahasa Inggris terlalu panjang, terdapat kekhawatiran peserta didik merasa bosan dan mengurangi minat serta semangat belajar mereka.



Gambar 19 Jumlah JP Bahasa Inggris di SD Menurut Responden Guru dan Kepala Sekolah

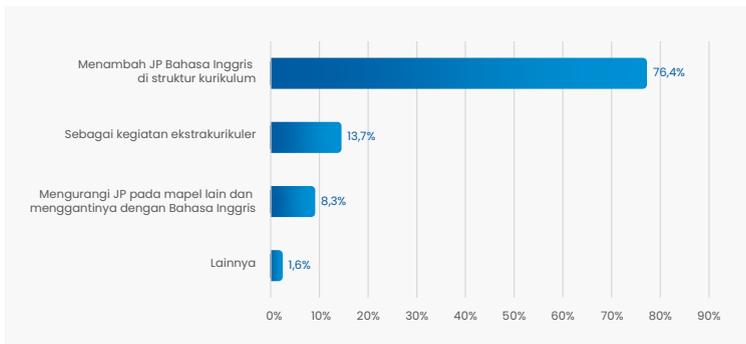
Mengkaji dan menguji coba apakah bahasa Inggris lebih efektif jika berdiri sendiri sebagai mata pelajaran terpisah atau terintegrasi dengan mata pelajaran lain.

Mata pelajaran bahasa Inggris dapat dimasukkan ke dalam struktur kurikulum, misalnya dengan menambah jam pelajaran di struktur kurikulum dan tidak

memotong jam proyek atau mengurangi jam mata pelajaran tertentu. Usulan ini bertujuan untuk memperluas cakupan pembelajaran peserta didik dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan ruang lebih untuk mata pelajaran bahasa Inggris, karena dianggap masih kekurangan jam pelajaran. Tujuannya adalah tetap menjaga keseimbangan antara berbagai aspek pembelajaran dalam kurikulum yang ada. Meski demikian, salah satu kepala sekolah mengungkapkan kekhawatiran jika menambah jam di struktur kurikulum.

“Konsekuensi jika menambah [jam pelajaran], maka jam pulang siswa juga akan bertambah [semakin lama], [selain itu] ada sekolah yang kekurangan ruangan.”

Bentuk usulan strategi lainnya adalah menjadikan bahasa Inggris sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Terdapat pula usulan untuk mengoptimalkan pengurangan JP pada mata pelajaran lain, seperti pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, seni budaya, atau IPA sebagai alternatif untuk menambah JP bahasa Inggris di tingkat SD. Secara keseluruhan, pandangan ini mencerminkan upaya untuk mengatur alokasi JP bahasa Inggris di SD dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berdampak pada pembelajaran yang berkualitas.



Gambar 20 Bentuk Strategi untuk Menambah JP Bahasa Inggris

Berdasarkan hasil DKT, persepsi guru dalam mengatasi beban kerja di satuan pendidikan menggambarkan kompleksitas implementasi pembelajaran bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar. Penyesuaian waktu, terutama saat seorang guru kelas beralih menjadi guru bahasa Inggris, memunculkan

pertimbangan terkait distribusi jam pelajaran. Solusi mengintegrasikan bahasa Inggris dengan mata pelajaran lain, seperti IPA, serta penambahan insentif atau honor, disepakati sebagai langkah penting untuk mendorong tanggung jawab tambahan ini.

C. Penyiapan Materi Pembelajaran dan Perangkat Ajar

Penyusunan modul ajar bahasa Inggris untuk fase B sampai fase F yang secara terus-menerus diperkaya.

Mayoritas responden guru menganggap bahwa keterampilan bahasa Inggris yang paling relevan untuk peserta didik SD adalah berbicara (*speaking*), diikuti oleh membaca (*reading*), menulis (*writing*), mendengarkan (*listening*), dan struktur kalimat (*grammar*). Untuk jenjang SMP/SMA/SMK, harapan kepala sekolah terhadap kompetensi bahasa Inggris peserta didik terstruktur, dengan fokus pada keterampilan berbicara, menulis, dan target skor TOEFL minimal 350.

*"Keterampilan yang diajarkan [mencakup] vocabulary, reading, speaking dan writing. Kenapa writing, memang writing ini sulit, tetapi kenapa writing diajarkan di SD, karena saat anak masuk SMP biar tidak kaget. Tiba-tiba saat masuk SMP disuruh membuat kalimat panjang. Jadi dari SD saya sudah melatih mengajarkan mereka, melatih semuanya."
(Guru SD, Kab. Bulungan)*

Dalam 1-2 tahun ke depan, diperlukan kegiatan penyusunan modul ajar bahasa Inggris yang sesuai dengan setiap fase pembelajaran, terutama fase B (kelas 3 dan 4), fase C (kelas 5 dan 6), fase D (kelas 7, 8, 9), fase E (kelas 10), dan fase F (kelas 11 dan 12). Modul tersebut harus mencakup pengenalan kosakata bahasa Inggris, dirancang untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris dengan percaya diri, serta memiliki kemahiran tata bahasa dan pemahaman yang memadai.

Materi pembelajaran yang disusun ini kemudian perlu melalui serangkaian proses uji coba dan evaluasi dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian, efektivitas, dan responsivitas perangkat ajar terhadap perkembangan peserta didik dan dinamika kurikulum yang berkembang. Perangkat ajar yang tersedia perlu terus diperkaya untuk menjaga minat dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran seiring dengan kenaikan tingkat kelas.

Menerapkan pendekatan dan metode pembelajaran bahasa Inggris yang inovatif dan interaktif.

Agar proses pembelajaran bahasa Inggris lebih menarik dan efektif, pendekatan *English for Young Learners* (EYL) dapat diadopsi terutama untuk pembelajaran pada jenjang SD. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan metode dan materi pembelajaran dengan bermain dan berbasis aktivitas. Pembelajaran mengaplikasikan strategi yang interaktif, seperti permainan bahasa, berbicara dalam konteks nyata, dan situasi simulasi, untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam menyusun modul ajar dan melaksanakan pendekatan EYL, kolaborasi dengan ahli bahasa dan pendidik yang memiliki pengalaman dalam pengajaran bahasa Inggris untuk peserta didik SD sangat dianjurkan.

Beberapa metode pembelajaran lain yang menurut guru efektif, di antaranya:

- **Teknik *Total Physical Response*** (TPR) diakui sebagai metode efektif dalam mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak, dengan penekanan pada gerakan fisik yang membantu menghubungkan kata-kata dengan tindakan fisik sehingga meningkatkan pemahaman dan pembelajaran. Antusiasme guru dalam mengajarkan keterampilan berbicara juga memberikan pengaruh. Eksperimen yang dilakukan di Perancis, Swedia, dan Holland pada peserta didik usia 7-9 tahun menunjukkan bahwa antusiasme guru akan memberikan hasil yang bagus sekali, terutama terkait pengucapan (Broughton dkk., 1980). Salah satu pendekatan yang membutuhkan antusiasme guru dalam melatih kemampuan berbicara, dikenal dengan *Total Physical Response* (TPR). TPR adalah metode pengajaran bahasa yang dikembangkan oleh Dr. James J. Asher (Rambe, 2019). Metode ini berfokus pada penggunaan gerakan fisik untuk membantu memahami dan mengingat kosakata dan tata bahasa dalam bahasa target. Baiza (2020) membuktikan bahwa TPR mampu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris peserta didik.

TPR didasarkan pada teori bahwa otak manusia mengalami pertumbuhan bahasa dengan cara yang mirip dengan bagaimana anak-anak belajar bahasa ibu mereka. Dalam metode TPR, guru memberikan perintah dalam bahasa target kepada para peserta didik dan meminta mereka untuk merespons dengan gerakan fisik yang sesuai dengan perintah

tersebut. Misalnya, jika guru memberi perintah “Berdiri”, para peserta didik akan berdiri; jika guru berkata “Ambil buku”, para peserta didik akan mengambil buku mereka. Aktivitas ini membantu peserta didik untuk menghubungkan kata-kata dengan tindakan fisik sehingga meningkatkan pemahaman dan mengingat kosakata dan tata bahasa dengan lebih baik (Asher, 1969).

Metode TPR sangat berguna dalam mengajarkan bahasa kepada anak-anak dan pemula, karena mereka dapat belajar bahasa seperti cara mereka belajar bahasa pertama, dengan mengikuti instruksi dan merespons dengan gerakan fisik. Metode ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran bahasa. Ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan guru dalam mengimplementasikan metode TPR (Celik dkk., 2021), yaitu:

1. Koordinasi ucapan dan gerakan membantu belajar bahasa. TPR menggunakan gerakan fisik untuk memahami dan mengingat kata-kata.
2. Tata bahasa diajarkan dengan memberikan contoh, bukan aturan langsung.
3. Makna lebih penting daripada bentuk. TPR fokus pada pemahaman kata atau kalimat, bukan hanya strukturnya.
4. Peserta didik lebih banyak mendengarkan sebelum diminta untuk berbicara aktif.
5. Pembelajaran bahasa lebih efektif dalam lingkungan yang santai dan bebas tekanan.
6. Peran guru penting dalam memilih perintah yang tepat untuk memperkenalkan kosakata dan struktur.
7. Peserta didik merespons perintah guru dengan gerakan fisik, menghubungkan kata dengan tindakan.
8. Pembelajaran lebih baik dalam lingkungan bebas tekanan. Mengurangi tekanan dan memberi kesempatan eksplorasi membantu peserta didik merasa lebih percaya diri dan sukses dalam belajar bahasa dengan TPR.

- **Fun learning** untuk meningkatkan daya tangkap peserta didik. Mayoritas guru bahasa Inggris di jenjang SMP/SMA/SMK menganggap kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris sebagai kompetensi utama yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di tingkat satuan pendidikan. Guru-guru mengakui pentingnya kemampuan berbicara (*speaking*) ini, tetapi menemukan bahwa banyak peserta didik mengalami ketakutan dan kurang percaya diri karena fokus pada tata bahasa yang benar. Untuk mengatasi ini, diperlukan lingkungan kelas yang positif dan bebas tekanan, serta metode pembelajaran seperti bermain peran, diskusi kelompok, presentasi, lagu-lagu, dan *games*. Bermain peran terbukti meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris pada peserta didik SD di Jawa Tengah (Ristianisa dan Suhardi, 2021).
- **Penggunaan media suara dan gambar (audio-visual)** diakui responden efektif dalam meningkatkan kompetensi bahasa Inggris peserta didik. Media ini memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi melalui penglihatan, pendengaran, dan pengucapan yang berulang-ulang, serta mendukung praktik percakapan sederhana. Penggunaan media ini juga dapat memotivasi, memvisualisasikan konsep, dan meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Penggunaan media ini mencakup video, film pendek, dan presentasi dengan kombinasi suara dan gambar, termasuk penggunaan aplikasi, permainan, gambar, dan lagu untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan kontekstual.

Sejalan dengan temuan kajian ini, McKown (dalam Miftakh, 2013) menyebutkan bahwa media audio-visual dapat memvisualisasikan substansi yang abstrak menjadi konkret, menarik dan memudahkan konsentrasi, lebih mudah dipahami, dan meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik. Fata dkk. (2018) juga menemukan bahwa penggunaan gambar dapat mengembangkan kemampuan bahasa Inggris. Media suara/audio sebenarnya dapat meningkatkan motivasi belajar bahasa Inggris, seperti yang dijelaskan dalam kajian Sakan dan Utanto (2019). Syafiq dkk. (2021) menemukan bahwa pemanfaatan video dapat meningkatkan keterampilan berbicara, penambahan kosa kata, pengejaan, *grammar*, dan konten. Kajian lain juga menunjukkan hasil yang serupa (Yükselir & Kömür, 2017). Selain video, pemanfaatan audio

juga dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris terutama dalam keterampilan mendengarkan (Abdul & Hijrah, 2013).

Hasil DKT juga menunjukkan bahwa menonton video atau mendengarkan audio berbahasa Inggris menjadi fokus dalam meningkatkan kompetensi *listening* dan *speaking*. Hasil penelitian Sembiring & Katemba (2023) dan Potosi dkk. (2009) memperkuat dampak positif penggunaan teknik menonton video, yaitu dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mendengarkan. Selain itu, teknik ini dapat ditindaklanjuti dengan mengembangkan dan merancang buku teks yang sesuai dengan video terkait (Saedi & Ahmadi, 2016) sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang topik yang diberikan, dan meningkatkan kosakata dan pelafalan (Wijayanti, 2021; Cahyana, 2020), serta meningkatkan keterampilan memahami bacaan peserta didik (Khalidiyah, 2015). Lebih lanjut, penggunaan video juga dapat meningkatkan motivasi, karena peserta didik dapat mendengarkan percakapan yang alami dengan bahasa yang akurat yang memungkinkan mereka belajar mengucapkan dengan intonasi yang benar. Melibatkan peserta didik dalam mencari video yang akan digunakan juga dapat meningkatkan peran aktif peserta didik sehingga tercapai keberhasilan dalam proses pembelajaran (Potosi, dkk. 2009).

Dalam penggunaan video, salah satu responden menyatakan film kartun dapat digunakan untuk meningkatkan penguasaan kosakata, dengan meminta anak untuk menebak kosakata yang muncul di film. Peserta didik SD di kelas tinggi dapat menggunakan metode *missing word* setelah menonton film di kelas. Selain itu, guru juga mendorong peserta didik untuk menggunakan bahasa Inggris dalam berbagai kesempatan, tidak hanya saat pelajaran bahasa Inggris saja.

- Menurut Rivers yang dikutip oleh Broughton dkk. (1980), peserta didik senang menirukan mimik dan gaya. Tanpa hambatan mereka akan berakting dan menyukai pengulangan gaya, karena memberikan perasaan puas. Dengan demikian, pendekatan oral melalui kegiatan permainan, lagu-lagu, dan dialog singkat akan membantu mereka melakukan pengulangan secara mandiri. Anak-anak selalu aktif secara fisik. Oleh sebab itu, menyanyikan lagu sambil bergaya, bermain drama, menggambar dan mewarnai gambar, panggung boneka atau permainan

seperti “*Simon Says*” adalah contoh kegiatan yang mendorong ekspresi alami bagi para peserta didik.

Dalam pembelajaran bahasa, terutama bahasa asing, media menjadi alat penting dalam pembelajaran, karena (1) media gambar dapat membangkitkan motivasi dan mengembangkan pemikiran, mendorong peserta didik terlibat lebih dalam pada proses belajar, (2) gambar menjadi awal pembelajaran bahasa yang terkondisikan secara kontekstual, (3) gambar dapat membantu menjelaskan suatu konsep, (4) menggambarkan reaksi terhadap pertanyaan, dan (5) berpotensi meningkatkan dan menyampaikan informasi secara efektif melalui percakapan, cerita, dan diskusi (Susanti, 2021). Penggunaan media perlu dikelola dengan baik dan melalui perencanaan yang terstruktur, memperhatikan kesesuaian media dengan usia peserta didik, kesesuaian dengan materi atau teks (Cetinkaya & Sutcu, 2019), serta kesesuaian dengan pengetahuan dan keterampilan yang akan diajarkan.

Praktek penguatan kecakapan menyimak dan berbicara termasuk pengucapan (*pronunciation*) dilakukan dengan penggunaan audio maupun audio visual. Misalnya, menggunakan lagu-lagu dan puisi berbahasa Inggris yang sederhana, lalu anak diminta mendengarkan dan mengulang apa yang didengar. Sementara untuk video, anak diminta untuk menceritakan apa yang dilihatnya pada video. Selain itu, praktik penguatan kecakapan menyimak dan berbicara juga dilakukan melalui pengulangan (*repetition*), mengisi *missing word*, dan menjawab secara lisan pertanyaan yang diajukan. Untuk peserta didik SD kelas atas, materi diberikan secara tertulis atau dengan audio video, dan mereka diminta mempraktikkan percakapan sederhana.

Kegiatan pembelajaran menurut Broughton dkk. (1980) hendaknya memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berbicara mengenai hal-hal yang menjadi perhatian mereka, agar kegiatan pembelajaran menjadi relevan dan tidak menimbulkan kebosanan. Melakukan gerakan sambil bernyanyi misalnya adalah kegiatan dasar yang dapat dilakukan. Untuk membantu peserta didik membayangkan suatu objek, maka akses pada media suara dan gambar merupakan hal penting. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah ketersediaan sarana pembelajaran tersebut pada satuan pendidikan.

Terkait penyediaan sarana, pendapat para guru selaras dengan pembelajaran bahasa Inggris di Thailand, yang dapat dijadikan rujukan. Pada awal bahasa Inggris diperkenalkan sebagai mata pelajaran, Thailand bergantung sepenuhnya pada kemampuan guru mengajar tanpa menyediakan perangkat audio-visual. Saat itu, guru menjadi kelelahan dan memberikan dampak negatif pada hasil belajar peserta didik. Setelah melakukan evaluasi, pada tahun 1932, mulailah audio-visual disediakan dan memberikan dampak positif pada pembelajaran bahasa Inggris (Sukamolson, 1998).

Dengan perkembangan perangkat teknologi saat ini, media audio dan audio visual sangat mudah didapat. Pembelajaran bisa dilakukan berbasis IT pada sekolah atau daerah yang fasilitas IT-nya memadai. Namun, menurut Uther & Banks (2016), penggunaan IT juga harus mempertimbangkan kualitas subjektif terhadap berbagai perangkat tersebut, baik audio maupun visual sehingga pengembangan aplikasi multimedia untuk pembelajaran bahasa Inggris juga harus mempertimbangkan hal ini.

- Di samping itu, penggunaan **tutor sebaya** juga dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran, dan hal ini berdampak kepada *well-being* peserta didik (Wulandari & Inayati, 2022).
- **Pemanfaatan komunitas belajar** juga dianggap efektif oleh mayoritas responden dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, khususnya kemampuan bahasa Inggris guru dengan kecakapan bahasa Inggris terbatas. Komunitas pembelajaran pada awalnya berdampak pada meningkatnya kompetensi guru, tetapi akhirnya berdampak pada meningkatnya hasil belajar peserta didik (Doğan & Adams, 2017). Pembiasaan penggunaan bahasa Inggris di luar kelas dan dalam situasi informal merupakan pendekatan yang diakui penting untuk meningkatkan minat peserta didik dan juga untuk mendukung penguatan kompetensi berbicara peserta didik. Namun sayangnya di beberapa daerah, seperti Makasar dan Medan, komunitas belajar seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tidak berjalan dengan efektif. Namun demikian, ada beberapa komunitas belajar yang berjalan secara mandiri. Di Jawa Barat misalnya, diinisiasi oleh

Universitas Pendidikan Indonesia, ada kelompok guru yang mengajarkan bahasa Inggris SD. Kelompok ini berjalan secara independen. Melalui KKG atau MGMP, diharapkan guru dapat belajar bersama tentang materi pembelajaran, metode atau pendekatan yang dapat diterapkan untuk peserta didik SD.

"Setelah semuanya pembiasaan, yang berminat belajar lagi bahasa inggris, kami sediakan English club, jadi di situ kami belajarnya belajar lebih ekstra lagi. Di situ tempatnya anak-anak yang berminat belajar bahasa inggris. Kalau untuk sekolah kami seperti itu."

(Guru SD, Kab. Bulungan)

- Selain itu, **mengaitkan pembelajaran dengan budaya lokal** dapat menjadi daya tarik tersendiri, karena pembelajaran dilakukan secara kontekstual. Melalui cara ini, anak akan lebih mudah memahami karena konteks pembelajarannya familier bagi mereka.

Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran.

Penggunaan teknologi pembelajaran digital juga seharusnya terus dimanfaatkan untuk memberikan pengalaman belajar yang inovatif dan menyenangkan. Materi pelatihan digital dapat mencakup modul interaktif, video pembelajaran, latihan interaktif, dan asesmen *online* yang dapat diakses oleh peserta didik di luar jam pelajaran. Penggunaan teknologi ini akan memfasilitasi pembelajaran mandiri, merangsang minat belajar peserta didik, dan meningkatkan keterampilan digital mereka.

Meskipun demikian, para kepala sekolah dan guru berpendapat bahwa terdapat kendala dalam hal ketersediaan sarana prasarana di satuan pendidikan. Mayoritas responden menganggap bahwa sarana prasarana belum memadai, terutama dalam hal perangkat ajar seperti buku teks, modul ajar terstruktur, tujuan pembelajaran, dan buku non-teks berbahasa Inggris. Dalam konteks guru dengan keterbatasan kemampuan bahasa Inggris, para kepala sekolah menyarankan untuk menyediakan modul ajar yang terstruktur, mudah diterapkan, dan dilengkapi dengan metode permainan. Modul ini bertujuan untuk mendukung guru yang memiliki akses terbatas terhadap sumber belajar dengan penggunaan gambar, audiovisual, dan *audiobook*. Buku nonteks menjadi bahan bacaan dan rujukan dalam meningkatkan kompetensi peserta didik yang ketersediaannya diperlukan

untuk menambah literasi peserta didik yang disediakan, baik di ruang kelas maupun di perpustakaan.

“Penyediaan sumber daya yang memadai, pelatihan bagi guru, penggunaan media dan metode interaktif, serta pengaturan alokasi waktu yang bijaksana dianggap penting dalam mewujudkan keberhasilan pembelajaran bahasa Inggris di SD.” (Peserta DKT 2023, Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan)

Untuk mengimplementasikan materi pelatihan digital yang efektif, kolaborasi dengan industri teknologi pendidikan dapat menjadi langkah yang strategis. Melalui kerjasama ini, sekolah dapat memanfaatkan keahlian teknis dan pengalaman industri dalam mengembangkan aplikasi pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kolaborasi ini juga dapat membantu dalam merancang program pelatihan untuk guru-guru sehingga mereka dapat mengintegrasikan teknologi pembelajaran secara efektif dalam pembelajaran sehari-hari.

D. Penyiapan Guru untuk Mengajar Bahasa Inggris

Perluanya ditetapkan standar kompetensi untuk guru bahasa Inggris.

Pembelajaran bahasa Inggris merupakan pembelajaran yang memperkenalkan bahasa asing di dalam kelas. Untuk dapat mengajarkan bahasa ini di dalam proses pembelajaran, guru harus mampu mengenalkan tidak hanya materi pelajaran tetapi juga keterampilan bahasa Inggris seperti *speaking, listening, reading, writing*, maupun keterampilan *grammar*. Sebelum dapat mengajarkan keterampilan bahasa Inggris tersebut, guru dituntut sudah menguasainya terlebih dahulu. Dibutuhkan keterampilan bahasa Inggris yang mumpuni untuk dapat menunjang proses pembelajaran di dalam kelas. Oleh karena itu, diperlukan ambang batas tingkat kemahiran bagi guru untuk dapat mengajar melalui bahasa Inggris (Lie dkk., 2019).

Di negara-negara Asia Tenggara, ambang batas atau persyaratan keterampilan bagi guru bahasa Inggris menjadi perhatian di dalam kebijakan pendidikan. Negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam telah menetapkan persyaratan keterampilan bahasa Inggris bagi guru-guru yang mengajar di sekolah. Persyaratan tersebut seperti yang tergambar pada Tabel 5.

Tabel 5 Persyaratan Keterampilan Bahasa Inggris di Asia Tenggara

Negara	Persyaratan Guru Bahasa Inggris
Malaysia	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemampuan minimum C1 pada tes CEFR atau nilai minimal pada tes MUET • Memiliki pendidikan minimal S1 dari berbagai latar belakang bidang studi
Singapura	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki skor 5.5 pada tes IELTS atau tes yang sejenis (untuk PAUD/ setingkat PAUD) • Memiliki pengalaman paling sedikit 120 jam pada sertifikasi TEFL
Filipina	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki nilai minimum 7.5 (untuk mengajarkan IELTS) • Memiliki pengalaman minimal 120 jam pada sertifikasi TEFL
Thailand	<ul style="list-style-type: none"> • Skor TOEFL tidak boleh lebih rendah dari 40 • Skor TOEIC minimal 600 atau lebih tinggi • Skor IELTS minimal 5 atau lebih tinggi • Termasuk dalam kategori setidaknya B1 (untuk jenjang pendidikan dasar) dan B2 (untuk jenjang pendidikan menengah) pada CEFR
Kamboja	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pengalaman minimal 120 jam pada sertifikasi TEFL • Minimum skor pada tes IELTS akademik 6,5
Laos	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki sertifikasi TEFL • Memiliki skor minimum 79 pada TOEFL iBT • Memiliki skor minimum 6 pada tes IELTS
Vietnam	<ul style="list-style-type: none"> • Skor IELTS paling rendah 6,5 atau lebih tinggi • Setidaknya masuk dalam kategori B2 (untuk jenjang SD dan SMP) dan C1 (untuk jenjang SMA/K sederajat) pada CEFR.

Meskipun negara-negara di Asia Tenggara telah menetapkan syarat keterampilan bahasa Inggris bagi guru-guru yang mengajar bahasa Inggris di sekolah, Indonesia masih belum memiliki bentuk kebijakan yang sama. Tidak terdapat skor minimum atau keterampilan minimum yang harus dikuasai oleh guru-guru bahasa Inggris untuk dapat mengajar bahasa Inggris di kelas. Penyusunan standar kompetensi guru bahasa Inggris dapat merujuk pada Capaian Pembelajaran (CP) kompetensi bahasa Inggris lulusan peserta didik di Indonesia. Idealnya, guru memiliki kompetensi yang lebih tinggi dari kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik.

Kebijakan persyaratan minimum terhadap keterampilan bahasa Inggris di Indonesia justru terdapat pada capaian pembelajaran peserta didik di sekolah. Pada pembelajaran bahasa Inggris umum di Fase E dan F (SMA/MA/Program Paket C), pembelajaran bahasa Inggris berfokus pada penguatan berbahasa lisan dan tulisan dengan target CEFR B1. Kemampuan peserta didik dalam hal ini tercermin pada kompetensi:

- a. Mempertahankan interaksi dan menyampaikan sesuatu yang diinginkan, dalam berbagai konteks dengan artikulasi jelas;
- b. Mengungkapkan pokok pikiran utama yang ingin disampaikan secara komprehensif; dan
- c. Mempertahankan komunikasi walaupun terkadang masih terdapat jeda.

Selain pada mata pelajaran wajib, pembelajaran tingkat lanjut pada bahasa Inggris atau program di luar pengajaran bahasa Inggris wajib, yang diberikan untuk Kelas XI dan XII (SMA/MA/Program Paket C) memberikan persyaratan minimum keterampilan bahasa Inggris pada CEFR B2. Pada pembentukan profil pelajar Pancasila, pengajaran bahasa Inggris tingkat lanjut diharapkan dapat mewujudkan peserta didik yang merdeka, yakni menjadi pengguna bahasa Inggris yang mandiri dan percaya diri. Selain itu, pembentukan profil pelajar Pancasila juga dapat dicapai melalui berbagai aktivitas pembelajaran dengan berbagai jenis teks. Pada level B2 CEFR, peserta didik diharapkan mampu:

- a. Memahami gagasan utama dari teks yang kompleks, baik tentang topik konkrit terkait kejadian-kejadian di lingkungan sekitar, maupun topik abstrak terkait isu mutakhir atau topik terkait mata pelajaran lain dalam teks naratif, eksposisi, dan diskusi;
- b. Berinteraksi dengan lancar, spontan, dan mampu berinteraksi secara teratur dengan penutur jati bahasa Inggris, tanpa ada hambatan bagi kedua belah pihak yang berkomunikasi atau berinteraksi;
- c. Memproduksi teks berbagai topik dengan struktur organisasi yang jelas dan detail dan menjelaskan pendapat atau pandangan terkait isu dalam topik tertentu dengan memberikan manfaat dan kelemahan (pro dan kontra) dari berbagai pilihan atau pendapat. Semua karakteristik kemampuan bahasa Inggris level B2 sesuai dengan tujuan dari teks naratif, eksposisi, dan diskusi.

Dalam diskusi mendalam dengan kepala sekolah, para informan menyatakan bahwa kompetensi minimum guru yang diperlukan dalam mengajar bahasa Inggris di SD adalah kompetensi pedagogik dan kemampuan utama yang harus dimiliki adalah berbicara (*speaking*), baru kemudian kemampuan membaca (*reading*), mendengar (*listening*), dan menulis (*writing*). Para informan dalam

diskusi mengatakan bahwa fokus pembelajaran pada peserta didik SD adalah mendengar habituasi dengan kalimat/percakapan dalam bahasa Inggris, tentunya dengan metode pembelajaran yang menyenangkan.

Sari & Sembiring (2019) menyatakan bahwa keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang paling penting untuk dikuasai selama tujuan pembelajaran bahasa Inggris. Pentingnya keterampilan berbicara juga didukung oleh kesadaran para guru dan orang tua bahwa kemampuan berbahasa Inggris menjadi syarat untuk memasuki dunia kerja yang lebih luas. Sudarmo (2021) menyatakan bahwa berbicara dalam bahasa Inggris sebagai bahasa asing tidak hanya membutuhkan kemampuan keterampilan berbicara tetapi juga harus dibarengi dengan kemampuan berpikir secara mendalam (*thoughtful competence*) sehingga lawan bicara dapat lebih mudah memahami isi percakapan.

Secara umum, kompetensi yang harus dikuasai guru bahasa Inggris menurut hasil kajian dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6 Kompetensi Minimal yang Harus Dikuasai Guru Menurut Kepala Sekolah

Jenjang	Jawaban tentang kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh Guru bahasa Inggris	
	Kepala Sekolah	Guru
SD	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Listening, writing, reading, dan speaking</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Grammar, listening, writing, reading, dan speaking</i> • Keterampilan berkomunikasi yang baik • Mampu menginspirasi peserta didik agar mampu berbicara dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris • Kreatif untuk merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan interaktif serta menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan • Mampu memanfaatkan TIK
SMP & MTs	<ul style="list-style-type: none"> • Profesional • Pedagogik • <i>Listening</i> yang diikuti dengan <i>speaking</i> • Disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Writing, reading, speaking, listening, dan grammar</i> • Mengelola kelas

Jenjang	Jawaban tentang kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh Guru bahasa Inggris	
	Kepala Sekolah	Guru
SMA & MTs	<ul style="list-style-type: none"> • Yang utama adalah latar belakang pendidikan harus linier • <i>Listening, reading, speaking, dan writing</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Writing, reading, speaking, listening, dan writing</i> • Pedagogik • Lulus TOEFL dengan skor minimal B2 atau 450/500. • Lulus ujian minimal A2
SMK	<ul style="list-style-type: none"> • Yang utama adalah <i>speaking</i>, kompetensi lainnya kemudian 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Writing, reading, speaking, listening, dan writing</i> • Kualifikasi TOEFL, IELTS, TOEIC atau standar lainnya

Dalam upaya mengembangkan kualitas pengajaran, direkomendasikan untuk melakukan standarisasi kompetensi pengajar bahasa Inggris di SD. Hal ini dapat dicapai dengan mewajibkan sertifikasi yang diakui internasional, seperti TOEFL, IELTS, TEFL, atau sertifikasi serupa, sebagai persyaratan bagi guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini. Langkah ini akan memastikan bahwa para pengajar memiliki kemampuan berbahasa yang memadai dan metode pengajaran yang sesuai. Dengan standarisasi ini, kualitas pengajaran bahasa Inggris di SD akan terjamin sehingga memberikan dampak positif pada penguasaan bahasa Inggris peserta didik.

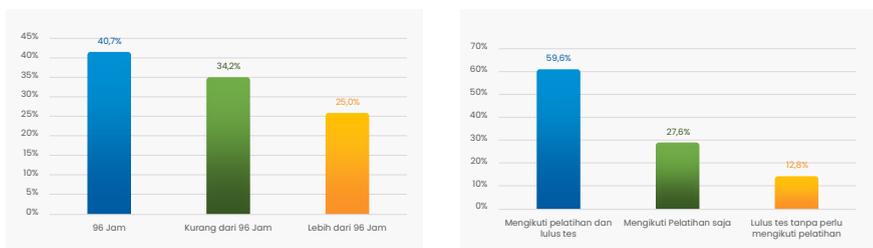
Meningkatkan kapasitas guru SD untuk dapat mengajar bahasa Inggris.

Hampir seluruh responden guru bahasa Inggris (87,7%) berpendapat bahasa Inggris sebaiknya diajarkan oleh guru mapel khusus dengan kualifikasi bahasa Inggris. Dalam diskusi mendalam, terdapat informan yang merasa berkeberatan kalau guru yang mengampu mata pelajaran bahasa Inggris adalah guru kelas, karena umumnya guru kelas yang ada sudah berumur dan kesulitan untuk mempelajari hal baru. Namun, saat ini jumlah guru bahasa Inggris di tingkat SD sangat terbatas. Oleh karena itu, salah satu solusi untuk dapat menerapkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di tingkat SD adalah meningkatkan kapasitas guru SD untuk dapat mengajar bahasa Inggris. Langkah ini penting dikarenakan mayoritas guru di tingkat SD berada pada level kemampuan A1 (*Beginner*).

Peningkatan kapasitas harus bertujuan untuk menyesuaikan peran guru menjadi fasilitator pembelajaran, dengan mengenakan metode pembelajaran interaktif dan teknik penilaian yang sesuai untuk pembelajaran bahasa Inggris di SD. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan para peserta didik akan mendapatkan dasar yang kuat dalam bahasa Inggris sejak dini dan mempersiapkan mereka untuk tantangan global di masa depan.

Peningkatan kapasitas juga disarankan untuk menyertakan pelatihan berbasis aplikasi pembelajaran digital kepada guru-guru bahasa Inggris di tingkat SMP. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mandiri para guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan mutu pengajaran bahasa Inggris di SD akan terus meningkat secara berkelanjutan dalam jangka menengah, memberikan manfaat optimal bagi peserta didik dan pengembangan pendidikan nasional secara keseluruhan.

Untuk dapat mengajar bahasa Inggris, guru SD perlu mengikuti pelatihan dan lulus tes sebagai prasyarat. Pelatihan yang diikuti idealnya berlangsung selama 96 jam atau lebih dan diikuti dengan tes. Skema *pretest* dan *post-test* dapat digunakan untuk melihat perkembangan capaian peserta. Selanjutnya, setelah pelatihan, tetap dilakukan pendampingan agar implementasi bisa terus dipantau dan dijamin mutu *output*-nya. Tentunya pelatihan yang diselenggarakan merupakan pelatihan yang terencana, terstruktur dan berkesinambungan.

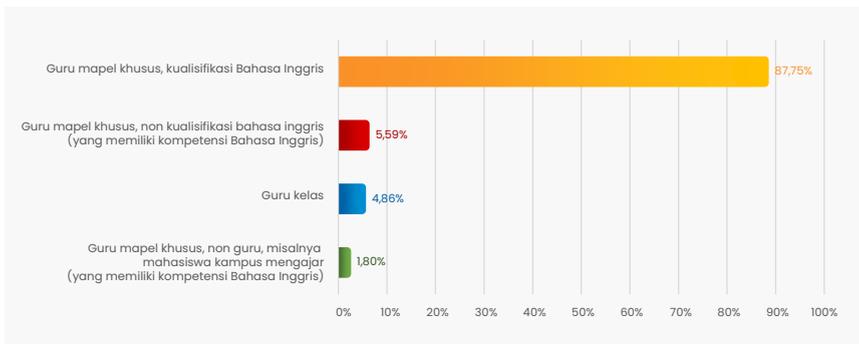


Gambar 21 Preferensi Jumlah Waktu Pelatihan Guru Bahasa Inggris dan Persyaratan bagi Guru Bahasa Inggris sebelum Mengajar

Dalam diskusi kelompok terpumpun, mayoritas para informan kepala sekolah juga mengemukakan pendapat bahwa program pelatihan untuk guru dapat dilakukan secara daring, luring, atau kombinasi keduanya. Optimalisasi pelatihan dapat dilakukan melalui pertemuan di Kelompok Kerja Guru (KKG) agar guru bisa latihan dan berbagi dengan rekan sejawat. Pelatihan perlu dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan jam pelajaran serta alokasi waktu per hari. Terdapat juga usulan bahwa pelatihan bisa dilakukan secara intensif pada saat libur sekolah. Para informan juga mengungkapkan perlunya dukungan dan peran dinas pendidikan untuk melakukan *need analysis* terhadap guru, serta membuka kerja sama dengan lembaga pelatihan. Untuk pengaturan waktu pelatihan para guru, para kepala sekolah di wilayah yang menjadi sampel diberikan pertanyaan pilihan terkait kapan waktu yang tepat bagi guru untuk dapat diberikan pelatihan sebagai persiapan mengajar bahasa Inggris. Mayoritas responden atau sebanyak 77% memilih awal tahun pembelajaran sekolah.

Perekrutan Guru Bahasa Inggris.

Meskipun penting, pelatihan kepada guru SD untuk mengajar bahasa Inggris dianggap bukan sebagai solusi paling efektif. Sebanyak 71,4% atau sekitar 609 responden kepala sekolah lebih memilih untuk melakukan perekrutan guru baru daripada melatih guru yang sudah ada. Hal ini diperkuat dengan hasil diskusi kelompok terpumpun (DKT) kepala sekolah di Kabupaten Bandung yang menyatakan bahwa perekrutan guru yang sesuai kualifikasi dan kompetensinya akan lebih baik dan lebih tepat. Senada dengan pendapat tersebut, informan dari Kabupaten Lombok Barat berkeberatan kalau guru yang mengampu mata pelajaran bahasa Inggris adalah guru kelas, karena umumnya guru kelas yang ada sudah berumur dan kesulitan untuk mempelajari hal baru. Kepala sekolah di Kabupaten Bandung juga menyebutkan bahwa opsi tersebut akan membantu para lulusan pendidikan bahasa Inggris yang terpaksa mengajar tidak sesuai bidangnya, misalnya menjadi guru kelas atau menjadi tenaga pendidik seperti pustakawan, untuk dapat menjadi pengajar bahasa Inggris sesuai kualifikasinya.



Gambar 22 Kualifikasi Guru yang Mengajarkan Bahasa Inggris di SD Menurut Guru SD

Namun, untuk memastikan lulusan pendidikan bahasa Inggris memiliki kompetensi yang mumpuni dalam mengajar peserta didik jenjang SD, diperlukan persiapan peningkatan kompetensi bahasa Inggris calon guru SD, termasuk di antaranya penyesuaian dalam PPG dan LPTK-Program Studi PGSD terkait penyelenggaraan mata kuliah *Teaching English to Young Learner*.

BAB 7

PENINGKATAN KOMPETENSI GURU SMP DAN SMA/SMK UNTUK MENDUKUNG KETERSEDIAAN GURU BAHASA INGGRIS DI TINGKAT SD

Regulasi untuk mendukung linieritas guru SMP dan SMA/SMK sebagai pengajar bahasa Inggris di tingkat SD.

Menugaskan guru bahasa Inggris dari jenjang lain (SMP/SMA/SMK) untuk mengajar bahasa Inggris di SD dapat menjadi solusi rendahnya beban mengajar guru bahasa Inggris di tingkat SMP/SMA/SMK dan mendukung kesiapan penerapan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di tingkat SD. Jam mengajar bahasa Inggris di tingkat SD dapat digunakan oleh guru bahasa Inggris tingkat SMP/SMA/SMK untuk menambah kekurangan jam mengajarnya. Hal ini perlu didukung dengan adanya kerangka aturan yang jelas bahwa mengajar bahasa Inggris di tingkat SD dianggap linear dan dapat dihitung sebagai beban mengajar guru bahasa Inggris di tingkat SMP/SMA/SMK.

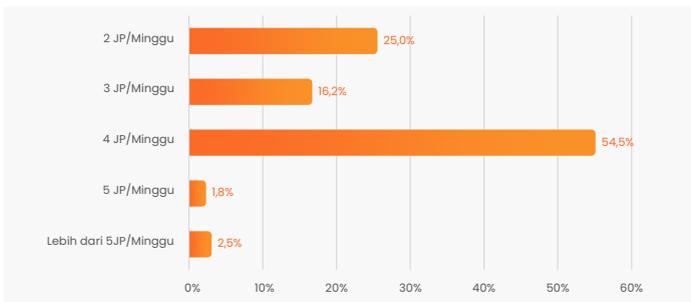
Berdasarkan hasil survei di empat kabupaten/kota, 97,2% responden kepala sekolah di tingkat SMP/SMA/SMK mengakui bahwa satuan pendidikan mereka sudah memiliki guru berkualifikasi pendidikan bahasa Inggris. Hal ini tidak mengherankan karena bahasa Inggris merupakan mata pelajaran wajib di tingkat SMP/SMA/SMK. Sebanyak 2,8% responden kepala sekolah yang tidak memiliki guru berkualifikasi bahasa Inggris terdiri dari 10 sekolah (1 sekolah negeri dan 9 sekolah swasta). Dalam diskusi dengan dua kepala sekolah (Kabupaten Lombok Barat dan Kota Ternate) dari daerah sampel juga ditemukan hal yang sama bahwa mereka belum memiliki guru yang berlatar belakang pendidikan bahasa Inggris.

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 99,7% kepala sekolah mengakui bahwa guru berkualifikasi bahasa Inggris di satuan pendidikan mereka sudah mengajar bahasa Inggris. Sementara 0,3% lainnya mengakui bahwa mereka memiliki guru berkualifikasi bahasa Inggris, tetapi tidak mengajarkan bahasa Inggris di satuan pendidikannya.

Hal tersebut selaras dengan hasil diskusi bersama informan kepala sekolah yang dilakukan di Samarinda, yang menyebutkan bahwa banyak guru dengan latar belakang bahasa Inggris tidak mengajarkan bahasa Inggris di SD, dengan kendala utamanya terdapat pada linieritas kompetensi guru bahasa Inggris yang tidak dimiliki di sekolah dasar. Hal tersebut berpengaruh terhadap tidak optimalnya metode pembelajaran yang diterapkan untuk tingkat SD.

Selain melalui linieritas, guru bahasa Inggris di SMP dan SMA/SMK juga dapat menutup kekurangan mengajar jika alokasi jam pelajaran bahasa Inggris ditambah.

Mayoritas responden guru SMP/SMA/SMK (88%) menyatakan jam pelajaran bahasa Inggris di tingkat SMP/SMA/SMK seharusnya ditingkatkan menjadi 4 jam pelajaran (JP) per minggu. Alokasi JP saat ini masih kurang untuk menyampaikan muatan materi yang akan dicapai. Penambahan JP diharapkan dapat menutup kekurangan beban mengajar guru yang selama ini tidak dapat diakumulasi untuk mendapatkan tunjangan profesi dan sertifikasi. Dengan peningkatan JP, diharapkan pula para guru dapat lebih efektif mengajarkan berbagai aspek penting dalam pembelajaran bahasa Inggris, seperti tata bahasa, keterampilan berbicara, menyimak, membaca, dan menulis sehingga peserta didik dapat mencapai kemampuan yang lebih baik dalam penguasaan bahasa Inggris.



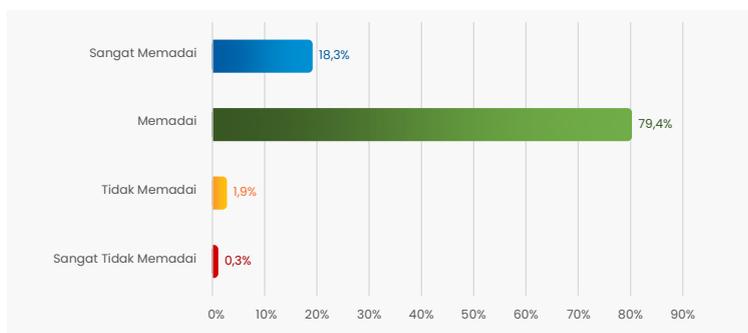
Gambar 23 Jumlah Jam Pelajaran Bahasa Inggris SMP/SMA/SMK per Minggu

“Untuk di SMA pemahaman konsepnya bagus. Yang dikeluhkan adalah jumlah jam mata pelajaran wajib hanya 2 JP. Saya mengusulkan ditambah menjadi 4 JP.” (Kepala Sekolah, DKT)

Sebanyak 54,5% dari total responden guru bahasa Inggris SMP/SMA/SMK mengajar selama 4 jam pelajaran/minggu. Sisa responden lainnya, yaitu sebanyak 25% mengajar selama 2 jam pelajaran/minggu, 16,2% mengajar selama 3 jam pelajaran/minggu dan persentase paling sedikit sebesar 1,8% mengajar selama 5 jam pelajaran/minggu. Sebanyak 2,5% responden memiliki jam mengajar lebih dari 5 jam per minggu. Karena lebih dari setengah responden guru sudah mengaplikasikan 4 jam pelajaran/minggu, maka proses adaptasi guru ketika kebijakan penambahan jam pelajaran ditetapkan akan lebih mudah karena sudah terbiasa sehingga guru dapat lebih fokus dalam pengembangan teknik dan substansi pembelajaran.

Perlunya meningkatkan kompetensi guru bahasa Inggris SMP/SMA/SMK untuk mendukung penerapan linieritas.

Minat dan keterampilan guru bahasa Inggris SMP/SMA/SMK untuk mengajar di tingkat SD perlu menjadi perhatian. Guru bahasa Inggris di tingkat SMP/SMA/SMK bisa jadi tidak memiliki kemampuan mengajar untuk peserta didik pendidikan dasar (English for Young Learners). Mengajarkan bahasa Inggris di SD juga dapat mengurangi fokus pada tingkat SMP/SMA/SMK yang memerlukan keterampilan dan materi yang lebih mendalam seperti pemahaman tata bahasa, pengembangan keterampilan berbicara, dan memahami teks dalam bahasa Inggris. Terakhir, guru bahasa Inggris merupakan lulusan bahasa Inggris dan bukan guru mata pelajaran lain sehingga mengajar di SD bisa jadi tidak relevan.

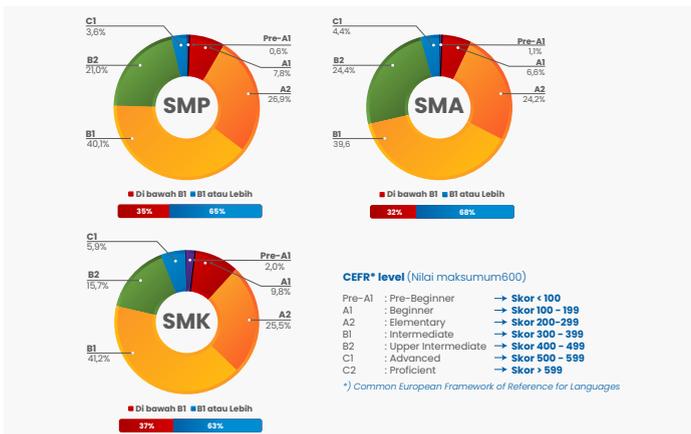


Gambar 24 Persepsi Kepala Sekolah terhadap Kemampuan Pedagogik Guru di Satuan Pendidikannya

Hasil persepsi kepala sekolah terhadap kemampuan pedagogik guru di satuan pendidikan mereka pada Gambar 23 menunjukkan sebanyak 18.3% kepala sekolah menilai bahwa guru bahasa Inggris di satuan pendidikan mereka memiliki kemampuan pedagogik yang sangat memadai. Sementara itu, 79,4% responden kepala sekolah lainnya menilai bahwa kemampuan pedagogik guru mereka memadai. Hal ini menyiratkan bahwa mayoritas kepala sekolah menilai bahwa guru bahasa Inggris mereka memiliki kemampuan mengajar yang mumpuni.

Selain memiliki kemampuan bahasa Inggris, kesiapan guru secara pedagogik diperlukan agar dapat menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai tahapan penguasaan bahasa pada peserta didik. Hal itu juga disepakati oleh sebagian besar informan kepala sekolah saat pengumpulan data melalui diskusi yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Lombok Barat.

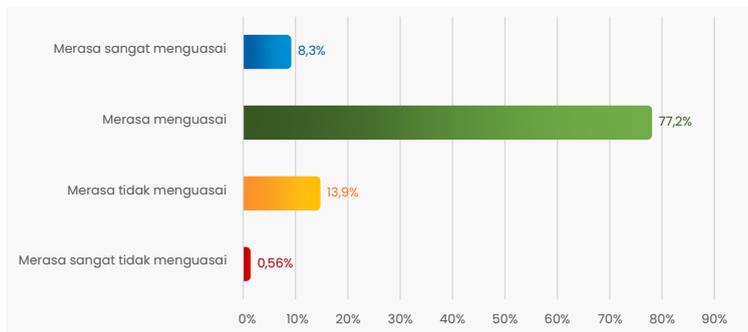
Selain kemampuan pedagogik, guru bahasa Inggris SMP/SMA/SMK juga perlu dibekali dengan kemampuan bahasa Inggris yang lebih mumpuni. Berdasarkan hasil tes English Score, lebih dari 60% dari 360 responden guru bahasa Inggris di tingkat SMP/SMA/SMK berada di level kemampuan B1 (*Intermediate*). Oleh karena itu, untuk dapat menerapkan linieritas, diperlukan pula dukungan untuk meningkatkan kompetensi guru bahasa Inggris SMP/ SMA/SMK.



Gambar 25 Nilai Tes Kemampuan Bahasa Inggris Guru Bahasa Inggris SMP, SMA, dan SMK

*“Salah satu kelemahan bahasa Inggris di SD adalah tidak adanya guru yang bersertifikasi bahasa Inggris di SD. Semoga hal ini mendorong pemerintah memikirkan masa depan anak-anak kita. Namun demikian, sebagai guru non bahasa Inggris, juga harus meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, karena berbahasa Inggris saat ini sangat penting.”
(Guru bahasa Inggris SMK, Kota Ternate)*

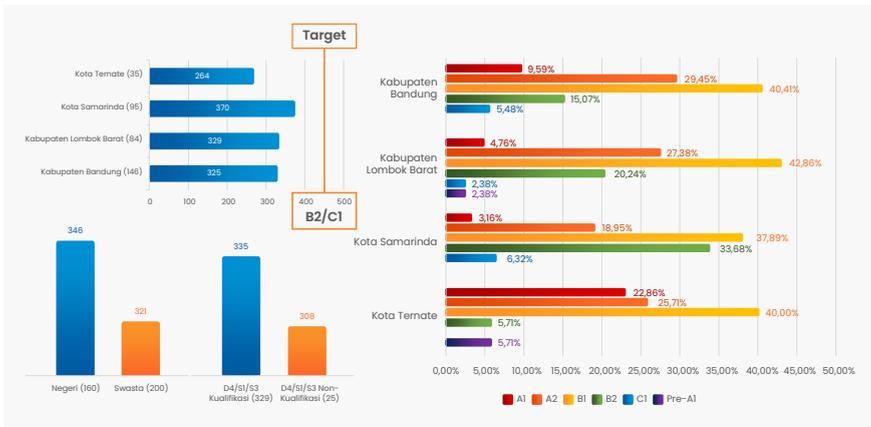
Sejalan dengan hasil tersebut, survei kepada guru bahasa Inggris SMP/SMA/SMK menunjukkan bahwa 77,2% merasa menguasai materi pelajaran bahasa Inggris. Sedangkan, hanya sedikit di antaranya atau sebesar 13,9% yang merasa tidak menguasai, sekitar 8,3% merasa sangat menguasai dan 0,6% merasa sangat tidak menguasai.



Gambar 26 Persepsi Penguasaan Materi Pelajaran Bahasa Inggris menurut Responden Guru

Kesenjangan nilai tes bahasa Inggris ditemukan baik di kota maupun kabupaten. Guru di sekolah negeri atau guru dengan kualifikasi bahasa Inggris memiliki rata-rata nilai bahasa Inggris lebih tinggi tetapi perbedaannya tidak terlalu signifikan. Nilai tes responden dengan kualifikasi bahasa Inggris lebih tinggi daripada non-kualifikasi bahasa Inggris.

Pada keempat kabupaten/kota, rata-rata nilai CEFR yang paling tinggi berada di level B1 dengan persentase di atas 40% untuk Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Ternate, serta 37,9% untuk Kota Samarinda. Lebih dari 25% guru responden di daerah sampel kecuali Kota Samarinda mencapai level A2. Sedangkan pada level B2, persentase tertinggi ada pada Kota Samarinda di angka persentase 33,7%.



Gambar 27 Rata-Rata Nilai CEFR Berdasarkan Kabupaten/Kota, Sekolah Negeri/Swasta, dan Kualifikasi Pendidikan



BAB 8

REKOMENDASI UNTUK PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Dari hasil kajian diketahui terdapat masih banyak tantangan yang dihadapi dalam rangka penerapan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di tingkat SD serta penerapan di tingkat SMP dan SMA/SMK. Tantangan tersebut secara garis besar berkaitan dengan kebijakan dan regulasi, kesiapan dan kompetensi guru SD, kesiapan peserta didik, dan metode pembelajaran. Untuk dapat mengatasi tantangan yang dihadapi, berbagai strategi telah dirumuskan terutama terkait waktu dan jenjang kelas untuk penerapan bahasa Inggris di tingkat SD, metode dan cara penyampaian materi serta penyiapan materi pembelajaran dan perangkat ajar, dan penyiapan serta peningkatan kompetensi guru untuk mengajar bahasa Inggris baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA/SMK.

Untuk mencapai hal tersebut, tim kajian memformulasikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan. Rekomendasi yang diberikan terbagi ke dalam langkah yang dapat dilakukan dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, bagi setiap direktorat terkait di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

A. Rekomendasi Kebijakan untuk Penerapan Bahasa Inggris sebagai Mata Pelajaran Wajib di Tingkat SD

1. Jangka Pendek

Rekomendasi kebijakan untuk menjadikan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di SD dalam jangka pendek (1-2 tahun) mencakup dua poin penting. *Pertama*, perlu disusun modul ajar bahasa Inggris yang sesuai dengan setiap fase pembelajaran, terutama fase B (kelas 3 dan 4) serta fase C (kelas 5 dan 6). Modul tersebut harus mencakup pengenalan kosakata bahasa Inggris, membangun keberanian peserta didik dalam berbicara dalam

bahasa Inggris, dan meningkatkan keterampilan mendengarkan. *Kedua*, perlu diadakan pelatihan intensif bagi guru yang akan mengajar bahasa Inggris. Pelatihan ini diperlukan untuk menyesuaikan peran guru menjadi fasilitator pembelajaran, dengan mengenalkan metode pembelajaran interaktif dan teknik penilaian yang sesuai untuk pembelajaran bahasa Inggris di SD. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan para peserta didik akan mendapatkan dasar yang kuat dalam bahasa Inggris sejak dini untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan global di masa depan.

2. Jangka Menengah

Dalam jangka menengah (2-3 tahun), ditekankan dua aspek krusial dalam menerapkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di SD. *Pertama*, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perangkat ajar bahasa Inggris yang diperkenalkan mulai dari kelas III hingga kelas yang lebih tinggi, untuk memastikan kesesuaian, efektivitas, dan responsivitas perangkat ajar terhadap perkembangan peserta didik dan dinamika kurikulum yang berkembang. *Kedua*, disarankan untuk memberikan pelatihan berbasis aplikasi pembelajaran digital kepada guru-guru bahasa Inggris di tingkat SD. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mandiri para guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan mutu pengajaran bahasa Inggris di SD akan terus meningkat secara berkelanjutan dalam jangka menengah, memberikan manfaat optimal bagi peserta didik dan pengembangan pendidikan nasional secara keseluruhan.

3. Jangka Panjang

Merancang rencana kebijakan jangka panjang (>3 tahun) untuk menerapkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di SD adalah kelanjutan yang terpadu dari rekomendasi kebijakan dalam jangka pendek dan menengah. Fokus *pertama* adalah terus memperkaya perangkat ajar bahasa Inggris khususnya untuk kelas IV dan seterusnya. Variasi dalam perangkat ajar ini bertujuan untuk menjaga minat dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran seiring dengan kenaikan tingkat kelas. Penggunaan teknologi pembelajaran digital juga seharusnya terus dimanfaatkan untuk memberikan pengalaman belajar yang inovatif dan menyenangkan. *Kedua*, dalam upaya mengembangkan kualitas pengajaran, direkomendasikan untuk melakukan

standardisasi kompetensi pengajar bahasa Inggris di SD. Hal ini dapat dicapai dengan mewajibkan sertifikasi yang diakui internasional, seperti TOEFL, IELTS, TEFL, atau sertifikasi serupa, sebagai persyaratan bagi guru-guru yang mengajar bahasa Inggris. Langkah ini akan memastikan bahwa para pengajar memiliki kemampuan berbahasa yang memadai dan metode pengajaran yang sesuai. Dengan standardisasi ini, kualitas pengajaran bahasa Inggris di SD akan terjamin, memberikan dampak positif pada penguasaan bahasa Inggris peserta didik.

Secara keseluruhan, rekomendasi kebijakan ini mencakup tiga jangka waktu yang terintegrasi: pendek, menengah, dan panjang. Dari pengenalan kosakata dan keterampilan berbicara di jangka pendek, penggunaan teknologi pembelajaran dan peningkatan kompetensi pengajar di jangka menengah, hingga pengembangan variasi perangkat ajar dan standardisasi kompetensi di jangka panjang. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan peserta didik akan memiliki dasar bahasa Inggris yang kuat dan relevan, mempersiapkan mereka untuk tantangan global di masa depan.

B. Rekomendasi Kebijakan untuk Penerapan Bahasa Inggris sebagai Mata Pelajaran Wajib di Tingkat SMP

1. Jangka Pendek

Dalam rangka mengakomodasi perbedaan kemampuan dan perkembangan bahasa peserta didik, disarankan agar disusun modul ajar bahasa Inggris yang disesuaikan dengan setiap fase. Fase D, yang merupakan fase kritis dalam perkembangan bahasa, perlu mendapatkan perhatian khusus. Modul-modul ini harus dirancang dengan konten yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif dan bahasa peserta didik sehingga memungkinkan pengajaran yang lebih terarah dan berfokus pada pemahaman dan komunikasi.

Agar proses pembelajaran bahasa Inggris lebih menarik dan efektif, diperlukan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik pada usia SMP. Pendekatan *English for Young Learners* (EYL) dapat diadopsi, yang menekankan pada penggunaan metode dan materi pembelajaran yang lebih bermain dan berbasis aktivitas. Guru-guru perlu dilatih dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran yang interaktif, seperti permainan bahasa, berbicara dalam konteks nyata, dan situasi simulasi untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam menyusun

modul ajar dan melaksanakan pendekatan EYL, kolaborasi dengan ahli bahasa dan pendidik yang memiliki pengalaman dalam pengajaran bahasa Inggris untuk peserta didik SMP sangat dianjurkan.

2. Jangka Menengah

Dalam upaya melengkapi usaha penyusunan modul ajar yang telah diusulkan pada kebijakan jangka pendek, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas perangkat ajar khusus fase D. Evaluasi ini dapat melibatkan guru-guru bahasa Inggris, ahli pendidikan, dan juga melibatkan peserta didik dalam memberikan masukan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala dalam implementasi sehingga perangkat ajar dapat diperbarui dan disesuaikan agar lebih responsif terhadap perkembangan peserta didik serta perkembangan dalam metode pengajaran.

Dalam era teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang, penyediaan materi pelatihan berbasis aplikasi pembelajaran digital menjadi penting. Kebijakan ini dapat melibatkan pengembangan aplikasi pembelajaran interaktif yang mampu mendukung dan memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Materi pelatihan digital dapat mencakup modul interaktif, video pembelajaran, latihan interaktif, dan asesmen daring yang dapat diakses oleh peserta didik di luar jam pelajaran. Penggunaan teknologi ini akan memfasilitasi pembelajaran mandiri, merangsang minat belajar peserta didik, dan meningkatkan keterampilan digital mereka.

Untuk mengimplementasikan materi pelatihan digital yang efektif, kolaborasi dengan industri teknologi pendidikan dapat menjadi langkah yang strategis. Melalui kerjasama ini, sekolah dapat memanfaatkan keahlian teknis dan pengalaman industri dalam mengembangkan aplikasi pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kolaborasi ini juga dapat membantu dalam merancang program pelatihan untuk guru-guru sehingga mereka dapat mengintegrasikan teknologi pembelajaran secara efektif dalam pembelajaran sehari-hari.

3. Jangka Panjang

Peningkatan variasi perangkat ajar, terutama untuk fase D dan tingkat yang lebih tinggi menjadi upaya utama untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Pengembangan modul ajar yang lebih canggih, mendalam, dan kontekstual akan membantu peserta didik memperdalam penguasaan bahasa Inggris.

Penambahan materi yang mengintegrasikan konten lintas disiplin dan situasi nyata akan membantu peserta didik untuk mengaplikasikan bahasa Inggris dalam berbagai konteks.

Dalam jangka panjang, penting untuk memiliki guru-guru yang berkualifikasi tinggi dan memiliki kompetensi bahasa yang kuat untuk mengajar bahasa Inggris. Oleh karena itu, diperlukan standardisasi kompetensi pengajar melalui sertifikasi yang diakui secara internasional, seperti TOEFL, IELTS, TEFL, atau sertifikasi serupa. Guru-guru bahasa Inggris perlu memiliki kemampuan bahasa di atas standar minimum agar dapat mengajarkan dengan baik dan memberikan panutan yang baik kepada peserta didik.

Kebijakan jangka panjang juga harus mencakup pengembangan program peningkatan profesional yang berkelanjutan bagi guru-guru bahasa Inggris. Program ini dapat mencakup pelatihan lanjutan dalam pengajaran bahasa Inggris, penggunaan teknologi terkini dalam pembelajaran, pengembangan kurikulum, serta mengintegrasikan strategi pembelajaran inovatif. Program ini dapat membantu guru-guru untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran mereka dan beradaptasi dengan perubahan dalam pendidikan dan teknologi. Untuk menjaga relevansi pengajaran bahasa Inggris, diperlukan penelitian dan inovasi berkelanjutan dalam metode pengajaran dan kurikulum. Pemerintah dapat mendorong penelitian di bidang ini melalui dana penelitian, beasiswa, dan penghargaan untuk guru-guru yang mengembangkan pendekatan pembelajaran baru.

C. Rekomendasi Kebijakan untuk Penerapan Bahasa Inggris sebagai Mata Pelajaran Wajib di Tingkat SMA/SMK

1. Jangka Pendek

Untuk mendukung implementasi kebijakan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di tingkat SMA/SMK dalam jangka pendek (1-2 tahun), rekomendasi kebijakan mencakup langkah-langkah penting. *Pertama*, disarankan untuk menyusun modul ajar bahasa Inggris yang sesuai untuk setiap fase, khususnya fase E (kelas 10) dan F (kelas 11 dan 12). Modul ajar ini harus dirancang dengan pendekatan yang menarik dan relevan, memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berbahasa, komunikasi, dan pemahaman teks. *Kedua*, perlu dilakukan peningkatan durasi pembelajaran menjadi 2 JP/minggu untuk mata pelajaran

bahasa Inggris. Opsi penambahan ini dapat diimplementasikan dengan menambah 2 JP bahasa Inggris dalam struktur kurikulum secara menyeluruh atau dengan mengurangi jam pelajaran pada mata pelajaran lain. Selain itu, diperlukan pelatihan bagi pengajar dalam menerapkan pendekatan pembelajaran *English for Young Learners*, yang dapat mendorong peserta didik untuk belajar bahasa Inggris dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan, sesuai dengan karakteristik peserta didik di tingkat SMA/SMK. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penguasaan bahasa Inggris peserta didik akan terstimulasi lebih baik, mempersiapkan mereka untuk tantangan global di masa depan.

2. Jangka Menengah

Sebagai kelanjutan dari langkah-langkah dalam kebijakan jangka pendek (1-2 tahun), rekomendasi kebijakan dalam jangka menengah (2-3 tahun) bertujuan untuk mendukung dan memperkuat implementasi kebijakan bahasa Inggris wajib di tingkat SMA/SMK. *Pertama*, perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan terhadap perangkat ajar bahasa Inggris yang dimulai dari kelas III SD dan berlanjut hingga tingkat SMA/SMK. Evaluasi ini harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan guru dan ahli pendidikan, guna memastikan bahwa materi ajar tetap relevan, mengikuti perkembangan budaya dan teknologi, serta memberikan pemahaman mendalam bagi peserta didik. *Kedua*, penyediaan materi pelatihan berbasis aplikasi pembelajaran digital bagi guru bahasa Inggris menjadi langkah penting dalam menjawab tuntutan pendidikan abad ke-21. Dengan pelatihan ini, guru dapat mengembangkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi secara efektif dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan interaktif bagi peserta didik, serta membekali mereka dengan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan global.

Dengan menggabungkan evaluasi perangkat ajar yang berkelanjutan dan pemberian pelatihan teknologi, rekomendasi kebijakan jangka menengah ini akan memberikan landasan yang kuat bagi implementasi kebijakan bahasa Inggris wajib di tingkat SMA/SMK. Dengan demikian, diharapkan peserta didik akan mampu memahami dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan lebih baik, menghadapi tantangan global dengan percaya diri, serta meraih potensi penuh dalam pendidikan yang semakin terhubung secara global.

3. Jangka Panjang

Sebagai kelanjutan dari kebijakan jangka pendek (1-2 tahun) dan jangka menengah (2-3 tahun), rekomendasi kebijakan dalam jangka panjang (> 3 tahun) bertujuan untuk memantapkan implementasi bahasa Inggris wajib di SMA/SMK.

Pertama, variasi perangkat ajar bahasa Inggris perlu terus ditingkatkan, terutama pada kelas IV dan seterusnya. Hal ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan konten yang lebih beragam dan relevan dengan perkembangan budaya dan teknologi. Penggunaan media dan teknologi dalam pembelajaran juga sebaiknya ditingkatkan untuk memperkuat interaktivitas dan daya tarik.

Kedua, dalam jangka panjang, penting untuk mempertahankan upaya dalam melakukan standardisasi kompetensi pengajar bahasa Inggris. Hal ini melibatkan para guru untuk memiliki sertifikat yang diakui internasional, seperti TOEFL, IELTS, TEFL, atau sertifikat serupa. Langkah ini akan memastikan bahwa kualitas pengajaran bahasa Inggris terjaga dengan baik.

Secara keseluruhan, rekomendasi ini membentuk sebuah alur yang berkesinambungan dan terpadu dalam mengembangkan penerapan bahasa Inggris di SMA/SMK. Dari pengenalan bahasa dan pengembangan metode di jangka pendek, variasi perangkat ajar dan standardisasi kompetensi di jangka menengah, hingga penguatan jangka panjang, diharapkan peserta didik di SMA/SMK akan memiliki keterampilan bahasa Inggris yang kuat dan relevan untuk menghadapi tantangan masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisy, F. (2021). Kebijakan pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia dalam perspektif pembentukan warga dunia dengan kompetensi antarbudaya. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 6(3), 303—313. DOI:<https://doi.org/10.29303/jipp.v6i3.207>
- Archana, S., & Rani, K. U. (2017). Role of a teacher in English language teaching (ELT). *International Journal of Educational Science and Research (IJESR)*, 7(1), 1-4.
- Asher, J.J. (1969). The Total Physical Response Method for Second Language Learning. *The Modern Language Journal*, 53(1), 3-17. DOI:<https://doi.org/10.2307/322091>
- Barrot, J.S. (2018). English curriculum reform in the Philippines: Issues and challenges from a 21st century learning perspective. *Journal of Language, Identity & Education*. DOI:10.1080/15348458.2018.1528547
- Broughton, G., Brumfit, C., Flavell, R., Hill, P., & Pincas, A. (1980). *Teaching English as a foreign language*. New York, Amerika Serikat: Routledge.
- Cahyana, A.A.C. (2020). The use of Youtube video in teaching English for foreign language at vocational high school. *Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris Indonesia*, 8(2), 1-11.
- Celik, T.I, Cay, T., & Kanadli, S. (2021). The effect of Total Physical Response method on vocabulary learning/teaching: A mixed research synthesis. *English Language Teaching*, 14(12), 154-170. DOI:<https://doi.org/10.5539/elt.v14n12p154>
- Cetinkaya, L. & Sutcu, S.S. (2019). Students' success in English vocabulary acquisition through multimedia annotations sent via WhatsApp. *Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE*, 20(4), 85-98. DOI 10.17718/TOJDE.640517
- Dewantara, K.H. (1977). *Karya bagian I: Pendidikan*. Yogyakarta, Indonesia: MLPTS.

- Dewantara, K.H. (2009). *Menuju manusia merdeka*. Yogyakarta, Indonesia: Leutika.
- Fontillas, Lemuel R., Fontillas, Quintos, Sherrilyn B., and Ronquillo, & Cynthia M. (2022). Philippine English proficiency of the K12 students: Basis for the improvement of the English curriculum. *Proceedings of the 36th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation*, 733–739. Manila, Philippines: De La Salle University.
- Hawanti, S. (2014). Implementing Indonesia's English language teaching policy in primary schools: The role of teachers' knowledge and beliefs. *International Journal of Pedagogies and Learning*, 9(2): 162–170.
- Hinkel, E. (Ed.). (2011). *Handbook of research in second language teaching and learning: Volume 2*. Routledge.
- Kemendikbud. (1967). *Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 096 Tahun 1967 tentang Fungsi dan Tujuan Pengajaran Bahasa Inggris pada Lembaga-Lembaga Pendidikan Tingkat Lanjutan dalam Lingkungan Departemen P dan K*.
- Kemendikbudristek. (2022). *Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran*.
- Kementerian Pendidikan Filipina. (2016). *K to 12 curriculum guide: English*.
- Kementerian Pendidikan Korea Selatan. (2015). *The national curriculum for the primary and secondary schools*.
- Khalidiyah, H. (2015). The use of animated video in improving students' reading skill (A quasi-experimental study of seventh grade students at a junior high school in Jalancagak, Subang). *Journal of English and Education*, 3(1), 59-79.
- Kusnandar, V. B. (2022). *Sebanyak 115 juta masyarakat Indonesia menuju kelas menengah*: Databoks. Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/14/sebanyak-115-juta-masyarakat-indonesia-menuju-kelasmenengah>
- Mika, M.A., & Mardiana, N. (2023). Edukasi pentingnya bahasa Inggris di era globalisasi. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 246-251.

- Mudogo, B. (2020). SIL International. 2009. Ethnologue: Languages of the world. Webb, V., and Kembo-sure. 2000. African Voices: An introduction to the Languages and Linguistics of Africa. Cape Town: Oxford University Press. Wiley, TG 2000. Language planning and policy. In Sociolinguistic and Language Teaching, edited by SL McKay and NH Hornberger, 103-147. Cambridge, MA: Cambridge University. Journal of Education and Social Sciences, 103.
- Nuraeni, S. P. (2021). *Bahasa Inggris di era globalisasi. In teori & inovasi pendidikan masa depan*. Makassar, Indonesia: CV. Syahadah Creative Media.
- Potosi, L.J.A, Loaiza, E.A.G., Garcia, A.C.L. (2009). Using video materials as a teaching strategy for listening comprehension, Bachelor Thesis. <https://api.core.ac.uk/oai/oai:repositorio.utp.edu.co:11059/1936>
- Pusat Kurikulum dan Perbukuan. (2022). *Kajian akademik kurikulum untuk pemulihan pembelajaran*. Jakarta, Indonesia: Kemendikbudristek.
- Rambe, S. (2019). Total Physical Response. *English Education-English Journal for Teaching and Learning*, 7(1), 45-58. DOI: <https://doi.org/10.24952/ee.v7i01.1652>
- Republik Indonesia. (1989). *Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar*.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*.
- Saedi, M. & Ahmadi, H. (2016). The effect of watching videos in pre-reading on EFL learners' reading comprehension and attitudes. *Tesol International Journal*, 11(2).
- Sari, A.S.P & Sembiring, R.K.B. (2019). Improving students' English speaking skill through the implementation of talking stick method to the fifth grade students of State Primary School 028226 Binjai. *Journal of Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education*, 2(4). DOI: [DOI:https://doi.org/10.33258/birle.v2i4.552](https://doi.org/10.33258/birle.v2i4.552)
- Sembiring, H.T.R & Katemba, C. (2023). The use of Youtube english educational videos in improving listening comprehension. *Journal of English Language and Pedagogy*, 6(1). DOI:<https://doi.org/10.33503/journey.v6i1.2681>

- Sudarmo, S. (2021). The importance of speaking in English as a foreign language between skillful and thoughtful competencies: studying sociolinguistics perspectives. *Linguistics and Culture Review*, 5(S1), 113-124. DOI:<https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS1.1321>
- Sulistiyo, U., Haryanto, E., Widodo, H.P., & Elyas, T. (2020). The portrait of primary school English in Indonesia: policy recommendations. *Education*, 3-13: 48:8, 945-959, DOI:10.1080/03004279.2019.1680721
- Susanti (2021). The pictures in enhancing students English learning. *Judimas*, 1(1). DOI:10.30700/jm.v1i1.1050
- Umam, M. K., & Syamsiyah, D. (2020). Konsep pendidikan humanistik Ki Hadjar Dewantara dan relevansinya terhadap desain pembelajaran bahasa Arab. *EDULAB: Majalah Ilmiah Laboratorium Pendidikan*, 4(2).
- Uther, M. & Banks, A.P. (2016). The influence of affordances on user preferences for multimedia language learning applications. *Behaviour and Information Technology*, 35(4), 277-289. DOI:10.1080/0144929X.2016.115107
- Wijayanti, A. & Gunawan, Y.B. (2021). Pembelajaran Bahasa Inggris dengan bantuan Media Video Pendek Youtube, *RESONA Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*. DOI:<http://dx.doi.org/10.35906/resona.v5i1.637>
- Zein, Subhan. (2016). Pre-service education for primary school English teachers in Indonesia: policy implications. *Asia Pacific Journal of Education*, 36(1), 119-134. DOI:10.1080/02188791.2014.961899
- Zein, Subhan. (2017). *Access policy on English language education at the primary school level in the ASEAN Plus Three member states: motivations, challenges and future directions*

UPTD SDN 1 KIARAPEDES



What is your name

My name is



PSKP
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

